

**MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI
SDN MLOKOREJO II KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

ULFATUN KHOIROH

NIM: 084 103 043

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JEMBER
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad SAW telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun satu bentuk masyarakat yang disebut masyarakat *madani* yakni masyarakat berperadaban (*madaniyah*), karena tunduk dan patuh kepada (*din*) atau peraturan. Sebuah bentuk *reformasi* total terhadap masyarakat yang tidak mengenal hukum (*lawless*) *jahiliyah* (Nata, Abuddin, 2007: 125).

Semangat inilah yang seharusnya menginspirasi umat Islam hari ini, hingga tidak ada lagi ungkapan-ungkapan yang *memarginalkan* posisi kaum muslimin, dengan disandingkan kepadanya berbagai predikat ‘miring’, seperti: masyarakat miskin, terbelakang, tidak berpendidikan, bahkan sebutan *teroris* dan *barbar* pun dialamatkan kepadanya.

Lalu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri umat Islam, mungkinkah hal ini berkaitan langsung dengan masalah yang menyangkut kebutuhan dasar manusia yakni pendidikan, lalu bagaimana pendidikan dimata masyarakat muslim, apa pula yang dimaksud dengan pendidikan agama islam, apa kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama islam dan kontribusi apa yang dapat diberikan masyarakat kepada penyelenggaraan pendidikan agama islam, semuanya akan dibahas dalam penelitian ini.

Sebuah arah baru pengembangan pendidikan agama islam yang lebih memberdayakan pendidikan agama islam secara lebih *pluralis* dan kurikulum

yang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan global, mengembangkan *life skill* dalam kurikulum PAI, menerapkan nilai-nilai *life skill* tersebut dalam pengamalan ajaran agama, serta *meredefinisi* atau mendefinisikan kembali *islamisasi* ilmu pengetahuan (Muhaimin, 2003: 147), menjadi sebuah upaya pemikiran kearah pencerahan pendidikan agama islam dimasa datang.

Untuk menjaga keberlangsungan pendidikan agama islam, dibutuhkan satu penopang yang harus bekerja secara *sinergis* yakni keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara (Arifin, Syamsul, 1996: 37). Khusus berbicara tentang masyarakat sebagai salah satu penopang kesinambungan pendidikan agama islam, maka partisipasi adalah satu hal yang tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat dengan kata lain masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam kesinambungan pendidikan agama islam.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (1993) mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Untuk menghasilkan produk pendidikan yang maju dan berkualitas, maka ketiga pihak tersebut perlu saling membantu dan bekerja sama dengan baik, orang tua berkewajiban memberikan nilai-nilai dasar bagi pendidikan anaknya serta berhak mendapatkan informasi perkembangan pendidikan anaknya (pasal 7), masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (pasal 8 dan 9).sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik, menjamin penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu serta penyediaan dana yang memadai bagi terselenggaranya pendidikan bagi warga Negara dalam masa wajib belajar 7 sampai 15 tahun (Pasal 10 dan 11 UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003).

Banyak kasus di lapangan yang penyelesaiannya menuntut kerja sama pihak-pihak di atas, misalnya anak sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, tingginya angka putus sekolah, bahkan belakangan ini maraknya kasus penyalahgunaan obat terlarang dan pergaulan bebas di kalangan pelajar yang jelas akan merusak mental dan masa depan pelajar itu sendiri.

Bertolak dari adanya kasus-kasus di lapangan serta upaya menaikkan mutu/kualitas program pendidikan, pihak sekolah harus berupaya memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang ada di sekolah dan sumber daya yang ada di tengah masyarakat dengan *mensosialisasikan* pentingnya partisipasi masyarakat terhadap program sekolah agar secara bersama-sama dapat menekan kasus-kasus yang sangat merugikan generasi bangsa, karena kasus semacam ini tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah melainkan adanya kerjasama yang *intensif* antara sekolah dengan masyarakat baik masyarakat *terorganisir* maupun masyarakat umum dan tentu saja orang tua siswa atau keluarga.

Namun Sahidu (1998:46) menyayangkan selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam *implementasi* atau penerapan program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat lebih difahami sebagai upaya *mobilisasi* untuk kepentingan pemerintah atau Negara, belum menyentuh pada tataran

pengambil kebijakan atau pengontrol kebijakan. Seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka dan perwujudannya dapat dilakukan secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kiranya perlu memikirkan *optimalisasi* sumber daya masyarakat ini dan harus dikelola secara *manajerial* dan *professional*.

Partisipasi adalah sebuah sikap yang mencirikan masyarakat dinamis. Conyears (1994), mengidentifikasikan tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satu diantaranya adalah partisipasi dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan dasar lainnya seperti pangan sandang dan papan, kemudian pendidikan, kesehatan dan air bersih (Conyears, Diana, 1994: 45).

Mencermati teori Conyears, antara partisipasi dengan pendidikan keduanya merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan manusia, sangat dimungkinkan ketika pendidikan membutuhkan partisipasi sehingga menjadi salah satu modal utama pendidikan dengan menambahkan satu unsur penting diantara keduanya yakni manajemen. Mengapa manajemen? karena tanpa manajemen seluruh potensi dan kekuatan yang ada tidak akan dapat bermanfaat secara efektif bagi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Ali bin Abu Thalib RA pernah berkata, “kejahatan yang terorganisir dengan baik dapat mengalahkan kebaikan yang tidak dikelola dengan baik.” (Hafifuddin, 2005: 4). Pernyataan ini menggambarkan begitu besar *komitmen* Saidina Ali terhadap prinsip manajemen, sebagai upaya mendorong kaum muslimin agar bekerja dengan perencanaan yang matang, proses yang rapi dan dinamis, dilakukan kontrol yang cermat dan akurat serta evaluasi yang obyektif, sehingga tujuan dapat tercapai dengan maksimal.

Dalam hal ini manajemen menjadi tugas penyelenggara dan pengelola pendidikan yakni pemerintah dan sekolah. Karenanya sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan harus terus berupaya memelihara (*maintenance*) partisipasi masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dengan tawaran-tawaran program yang mampu menarik simpati dan menggugah gairahnya untuk berpartisipasi dan tentu saja program tersebut dapat menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan.

Peran serta masyarakat menjadi isu penting dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam program pendidikan serta lahirnya sebuah tawaran manajemen berbasis sekolah (SBM) yang memberi otonomi relatif luas kepada sekolah dan masyarakat. Pada Bab III pasal 8 dinyatakan bahwa “*masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan*” (Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003: 87). Ini menandakan bahwa eksistensi dan partisipasi masyarakat

semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan agama islam.

Selain jaminan Undang-undang akan pentingnya partisipasi masyarakat, adakah kemudian yang memotivasi masyarakat secara mandiri untuk ikut menentukan nasib pendidikan bangsa, terlebih lagi kesinambungan pendidikan agama islam yang berlangsung secara formal di sekolah. Sementara kita ketahui bahwa sekalipun tugas penanam *aqidah* adalah kewajiban orang tua di rumah tetapi akan sangat tidak menjamin jika lembaga keluarga sebagai lembaga non formal, tidak memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan manajemen yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik sekalipun hanya lingkup anggotanya sendiri. Maka fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai manajemen tersendiri dalam pengelolaan pendidikan, keberadaannya menjadi semakin dibutuhkan. Karenanya *kolaborasi* antara masyarakat dengan lembaga harus dikembangkan secara *sinergis*, mengingat adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa. Bagaimana sekolah kemudian memfasilitasi masyarakat untuk ikut memberikan sumbangsih secara moril maupun materiil dalam rangka mendukung tercapainya cita-cita pendidikan Indonesia khususnya pendidikan agama islam.

Partisipasi yang didasari oleh kesadaran dan ketulusan niat untuk ibadah tergambar jelas dalam riwayat tersebut. Kedekatan ummat dengan pribadi seorang pemimpin pembawa risalah kebenaran seperti Rasulullah mampu

memotivasi ummat untuk berperan serta dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran, memajukan ummat dan meninggikan nilai-nilai Islam. Semangat ini sangat mungkin tergambar kembali ketika lembaga pendidikan sekolah mampu memfungsikan dirinya sebagai lembaga penegakan nilai-nilai kebenaran.

Menurut Nasution (1999), bagi masyarakat, hakekat pendidikan diharapkan mampu berfungsi sebagai penunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya kepada generasi mudanya. Tiap masyarakat selalu berupaya untuk meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan (sekolah) atau secara khusus melalui *interaksi* sosial. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses *sosialisasi* (Nasution, 1999: 117).

Dengan jaminan Undang-Undang serta kesadaran yang penuh dari masyarakat untuk berpartisipasi kiranya belum cukup untuk mengharapakan terwujudnya satu bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, apabila sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tidak mampu mengelola potensi dan memanfaatkan peluang yang ada melalui sistem manajemen yang baik yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat pendidikan dalam arti luas.

Masyarakat sebagai pemilik kontribusi terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kiranya perlu dikelola secara manajerial agar sumber daya tersebut dapat digali lebih optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan pendidikan sehingga pada saatnya pendidikan akan menjadi milik masyarakat sepenuhnya, pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa di SDN Mlokorejo II terjadi komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan beberapa lembaga (masyarakat terorganisir) yang menjadi mitra kerjasamanya, sehingga partisipasi masyarakat terhadap sekolah sangat jelas terlihat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaanya partisipasi masyarakat telah berlangsung dari sejak sekolah ini berdiri hingga sekarang.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di SDN Mlokorejo 02 dapat diidentifikasi menjadi 2 macam, yaitu: (1) Partisipasi materi, seperti: sumbangan uang dan bahan bangunan; (2) Partisipasi non material, seperti: sumbangan kerjasama, sumbangan ide dan saran, dan dan sumbangan moril, pengawasan, keamanan, dan komitmen bersama (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger merupakan lembaga pendidikan umum, namun pengembangan di dalamnya sangat bercirikan agama Islam. Pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II tidak hanya tanggung jawab guru PAI, tetapi semua guru kelas dan mata pelajaran, bahkan masyarakat sekitar pula. Oleh karena itu, dari uraian tersebut maka penulis

merasa tertarik untuk meneliti tentang: **“Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu: bagaimana manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015?

Adapun sub-fokus penelitian tersebut antara lain:

1. Bagaimana penerapan manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN

Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan penerapan manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015.
3. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2014/2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam bidang pendidikan agama islam, khususnya terkait dengan manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menghasilkan sumbangsih pengetahuan dan dalil dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya terkait dengan manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama islam, yang sejalan dengan tuntutan ajaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Bagi lembaga SDN Mlokorejo II. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan konsep manajemen partisipasi yang diterapkan di lembaga tersebut.
- b. Peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan menjadi tolok ukur seberapa dalam pengetahuan dan wawasan terkait dengan manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam, serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan dalam keterampilan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.
- c. Pembaca dan peneliti lain. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian pengembangan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda.

E. Definisi Istilah

1. Manajemen Partisipasi Masyarakat

Manajemen partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pendayagunaan sumber daya sekolah dan masyarakat melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien dengan segala aspeknya.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini lebih bersifat dorongan internal dari dalam diri *partisipan* (masyarakat) dan juga adanya peluang dari penyelenggara pembangunan itu sendiri. Sedangkan masyarakat dalam penelitian ini yaitu semua warga yang ada di sekitar

lingkungan sekolah, terutama orang tua siswa. Dalam penelitian ini, memfokuskan pada penerapan manajemen partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan selama ini.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tidak tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan.

Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu meliputi semua komponen, usaha, dan sistem yang berhubungan dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah, baik terkait dengan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas oleh pendidik maupun pengembangan Pendidikan Agama Islam secara umum.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Pada Bab satu akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi dari Bab satu ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dari skripsi ini.

Pada Bab dua akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi: konsep manajemen, konsep partisipasi masyarakat, dan konsep pendidikan agama Islam. Fungsi dari Bab dua ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil dari penelitian yang pernah ada dalam bidang yang sama, serta membicarakan teori yang terkait dengan topik penelitian ini.

Pada Bab tiga akan dijelaskan mengenai metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi Bab tiga ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

Pada Bab empat akan dijelaskan mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian. Fungsi Bab empat ini adalah pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Pada Bab lima akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Fungsi dari bab lima ini adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, sekaligus penyampaian saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengungkap tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti penelitian yang dilakukan oleh Herman dan Yeah (1983), mereka menemukan bahwa partisipasi orang tua berhubungan positif dengan prestasi anak di sekolah. Kemudian Lareau dan Benson (1984), melaporkan bahwa keterlibatan orang tua secara praktis di sekolah mampu meningkatkan produktivitas sekolah.

Keith dan Girling (1991), menemukan bahwa pelibatan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan membawa dampak positif terhadap prestasi siswa, menambah suplemen dan komplemen bagi pelaksanaan program, membawa pembaharuan dalam organisasi serta dapat memberi dukungan secara politis bagi pelaksanaan program pendidikan.

Marno dalam tesisnya (2001), yang meneliti tentang *Parental Choice Of Education* di MIN Malang, menemukan bahwa MIN Malang sebagai lembaga pendidikan agama menjadi alternatif utama dan pertama bagi masyarakat menengah ke atas, karena semakin masyarakat menjadi komunitas terpelajar maka semakin banyak pertimbangan dalam memilih sekolah atau lembaga pendidikan.

Duki dalam tesisnya (2002), yang meneliti tentang *Hubungan Masyarakat dengan Lembaga Pendidikan Islam*, menemukan bahwa prinsip keadilan, kedisiplinan, toleransi, kebijaksanaan, keteladanan, nasehat dan

argument yang baik merupakan strategi pengembangan kehumasan di SMU Shalahuddin Malang.

Agus Timan (2002), dalam penelitiannya tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Humas di SDN Kota Malang*, menemukan bukti bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan efektivitas program kehumasan di SDN Kota Malang selaku SDN Favorit.

Muhammad Ramli dalam tesisnya (2008), yang ingin mengetahui tentang *Manajemen Partisipasi Masyarakat di MIN Malang*, menemukan bahwa manajemen yang dikembangkan oleh MIN Malang adalah manajemen partisipatif berupa finansial dan ide atau gagasan.

Adapun penelitian ini ingin mengungkapkan manajemen yang diterapkan oleh SDN Mlokorejo II dalam menggalang partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pendidikan Islam. Kalau penelitian sebelumnya, orang tua siswa sebagai obyek penelitian, tetapi penelitian ini ditujukan bukan hanya kepada orang tua siswa tetapi kepada masyarakat umum baik masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan apa yang menghambat partisipasi dan mengungkapkan pula apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

B. Kajian Teori

1. Kajian Teori Manajemen Partisipasi

a. Teori Manajemen

1) Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya (Siagian, 1992: 1). Istilah manajemen merupakan istilah yang digunakan untuk menterjemahkan kata *management* istilah yang digunakan sebelumnya adalah pengelolaan, namun belakangan ini istilah tersebut sudah jarang digunakan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan kajian ilmu manajemen secara khusus, definisi manajemen juga mengalami perkembangan dengan memberikan uraian lebih spesifik melalui penyebutan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer dalam menjalankan tugasnya (Mujdjahid, 2003: 2).

Hasibuan (1994: 2) mengatakan bahwa, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Sejalan dengan itu, Mujdjahid (2003: 2) juga mengatakan, “Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan

melalui orang lain.” Berdasarkan definisi ini tampak bahwa proses manajemen akan terjadi apabila kita melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, manajer tidak dapat melakukan sendiri tugas tersebut, tetapi melimpahkan pada orang lain atau karyawan atau bawahannya.

Menurut George R. Terry (1964), manajemen adalah suatu proses yang nyata mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang dan sumber-sumber daya lainnya.

Uraian di atas menegaskan bahwa manajemen sekolah adalah proses dan instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Karena itu, prinsip-prinsip manajemen sekolah yang dapat dipegang adalah memperoleh hasil yang paling efektif melalui orang-orang yang profesional mengacu pada visi dan misi sekolah dengan jalan melakukan proses manajemen, yakni menjalankan fungsi pokok program sekolah yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan sekolah sebagai penanggung jawab institusi sekolah, guru sebagai penanggung jawab pelayanan belajar pada peserta didik, dan tenaga kependidikan sebagai penanggung jawab pelayanan teknik kependidikan di sekolah yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen

yaitu: perencanaan (*planning*) program kegiatan sekolah, pengorganisasian (*organizing*) tugas-tugas pokok sekolah, penggerakan (*actuating*) seluruh sistem sekolah, dan pengawasan (*controlling*) kinerja sekolah (Sagala, 2011: 55).

Mengacu pada prinsip manajemen sekolah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas sekolah yang bermutu.

Sejalan dengan itu, Sagala (2011: 55) menyatakan bahwa, setiap sekolah melaksanakan manajemen peningkatan mutu dengan langkah: (1) merumuskan visi, misi, tujuan dan target peningkatan mutu secara berkelanjutan; (2) menyusun perencanaan sekolah menggunakan model perencanaan strategi; (3) melaksanakan program sekolah sesuai formulasi perencanaan; (4) melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap program kerja yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efesiensi dan efektivitas serta kualitas penyelenggaraan program sekolah; (5) menyusun laporan kemajuan sekolah dan melaporkannya kepada orang tua siswa kemajuan hasil belajar anak-anaknya di sekolah, melaporkan kemajuan sekolah kepada masyarakat dan *stakeholders* sekolah serta pemerintah daerah;

dan (6) merumuskan program baru sebagai hasil evaluasi program sekolah dan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan menggunakan perencanaan strategi sekolah. Langkah-langkah ini penting karena akan mengukur pencapaian tujuan dan kualitas sekolah.

2) Fungsi-fungsi Manajemen

Proses manajemen dalam pelaksanaan peran dan fungsi-fungsi managerialnya yang merupakan rangkaian yang harus terlaksana dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam upaya pencapaian hasil dan tujuan yang diinginkan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

a) *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) dapat diartikan sebagai hal, cara atau hasil kerja merencanakan (berniat untuk melakukan sesuatu) (Poerwadarminta, 2007: 987). Koontz O'Donnell yang dikutip M. Manullang (1989: 48) mengatakan bahwa "*planning is the function of a manager which involves the selection from among alternatives of objectives, policies procedures and programs.*"

Yang artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program-program dari alternatif yang ada. Menurutnya, perencanaan berhubungan dengan pemilihan sasaran atau tujuan, strategi, kebijaksanaan, program, dan prosedur pencapaiannya.

Perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan (Purwanto, 2001: 16). Dan dalam proses perencanaan, terdapat beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi masalah, (2) perumusan masalah, (3) penetapan tujuan, (4) identifikasi alternatif, (5) pemilihan alternatif, dan (6) elaborasi alternatif (Suryosubroto, 2000: 22).

Perencanaan juga dapat dimaknai dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam menentukan tujuan dan target sebuah aktifitas melalui pengumpulan data-data dan menganalisisnya untuk kemudian merumuskan metode dan tata cara untuk merealisasikannya dengan seoptimal mungkin. Dalam kaitan ini sebuah perencanaan harus memenuhi tiga unsur utama sebuah perencanaan yaitu: pengumpulan data, analisis fakta dan penyusunan rencana yang konkrit (Syafaruddin, 2005: 62).

Sergiovanni (1987) dalam Sagala (2011: 57) mengungkapkan, "*plans are guides, approximations, goal post, and compass setting not irrevocable commitment or dicision commandements.*" Hal ini menunjukkan perencanaan sekolah adalah tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, dan letak-letak pedoman yang telah jadi komitmen dan pernyataan keputusan yang tidak dapat ditarik kembali, yang diatur dan disepakati secara

bersama-sama oleh kepala sekolah dan staf personal sekolah, berdasarkan periode waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Sagala (2011: 57) menjelaskan, menurut jangkauan waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek (satu minggu, satu bulan, satu semester dan satu tahun), perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu tiga sampai tujuh tahun, dan perencanaan waktu jangka panjang dibuat untuk jangka waktu delapan sampai dua puluh lima tahun.

Proses merancang suatu perencanaan harus memberikan kesempatan yang cukup untuk berdiskusi "*brainstorming*", mengutarakan dan memecahkan selisih pendapat (Moedjiarto, 1990). Kegiatan tersebut penting, artinya untuk mendapatkan masukan yang berharga selama proses perencanaan berlangsung. Dengan demikian, proses perencanaan yang efektif adalah kepala sekolah melibatkan guru untuk bekerjasama dalam upaya mengefektifkan program sekolah, dan memprakarsai program perubahan melalui usaha kolektif bersama guru dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah membuat suatu target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan

tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat.

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Koontz (1986) mengemukakan pengorganisasian adalah penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga yang terorganisasi secara formal. Menurut Sergiovanni (1987) dalam Sagala (2011: 59), “*Four competing requirements for organizing that should be considered are legitimacy, efficiency, effectiveness, and excellence.*” Pendapat ini menggambarkan bahwa ada empat syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian yaitu legitimasi, efisiensi, keefektifan, dan keunggulan.

Terry (1964) dalam Sagala (2011: 59) mengemukakan bahwa, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Pengorganisaian terdiri atas komponen penentuan sasaran, pembagian tugas, penentuan orang-orang yang melaksanakan tugas, dan kaitan antara orang dan kelompok dalam pekerjaan. Pengorganisasian secara umum melibatkan pihak-pihak internal organisasi maupun eksternal.

Suryosubroto (2000:24) mendefinisikan, pengorganisasian adalah sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang (guru dan personel sekolah lainnya), serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Yang termasuk dalam pengorganisasian ini adalah penetapan tugas, tanggung jawab, wewenang serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah.

Lebih kompleks lagi, Nanang Fatah (2005: 71) menjelaskan bahwa istilah pengorganisasian mempunyai dua pengertian umum. *Pertama*, pengorganisasian diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional. *Kedua* merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat dicapai secara efektif.

Sedangkan organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk nencapai tujuan bersaa dan sistem kerja sama telah diatur secara jelas siapa yang menjalankan, siapa yang bertanggung jawab, arus komunikasi dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Karakteristik sistem kerja sama dapat dilihat dari (1) Adanya komunikasi antara orang yang bekerja sama, (2) Individu dalam organisasi tersebut mempunyai

kemampuan untuk bekerja sama dan (3) Kerja sama itu ditujukan untuk mencapai tujuan (Fatah, 2005: 71).

Pengorganisasian sekolah adalah tingkat kemampuan kepala sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, dan personal lainnya di sekolah melakukan semua kegiatan manjerial untuk mewujudkan hasil yang direncanakan dengan menentukan sasaran, menentukan struktur tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan menentukan fungsi-fungsi setiap personal secara proporsional sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga terlaksananya tugas pada berbagai unsur organisasi. Pengorganisasian juga menentukan alat-alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, dana dan sumber daya sekolah yang lebih proporsional.

c) *Actuating* (Penggerakan)

Untuk melaksanakan hasil perencanaan dan pengorganisasian maka perlu diadakan tindakan-tindakan lain yaitu “*actuating*” (penggerakan) pelaksanaan “*actuating*” adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sebab tanpa fungsi ini, maka apa yang telah direncanakan dan diorganisir itu tidak dapat direalisasikan dalam kenyataannya (Burhanuddin, 1994: 240).

Dari rumusan tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa: fungsi motivasi dan pergerakan menempati posisi vital bagi langkah-langkah manajemen dalam merealisasikan segenap tujuan, rencana dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Khusus bagi pemimpin pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah dituntut keahliannya dalam menjalankan fungsi “*motivating*” ini, agar para anggota kelompok yang dihadapi mau bekerja secara ikhlas penuh antusias dan tanggung jawab sesuai dengan tugas-tugas yang telah dipercayakan pada mereka (Burhanuddin, 1994: 240).

Siagian (1992: 95) mengatakan bahwa, pergerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong organisasi mau dan berikhlaskan bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi, efektif dan ekonomis.

Terry (1964) dalam Sagala (2011: 60) menjelaskan bahwa, *actuating* berarti merangsang anggota-anggota kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan personal sekolah dalam melaksanakan program kerjanya.

Pemimpin yang efektif menurut Hoy dan Miskel cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang bersifat mendukung (*suportif*) dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok untuk membuat keputusan. Kefektifan seorang

pemimpin menunjukkan pencapaian tugas pada rata-rata kemajuan, keputusan kerja, moral dan kontribusi wujud kerja.

Penggerakan yang dilakukan kepala sekolah ini dengan pengakuan dan pujian atas prestasi kerja personel tersebut, karena ancaman atas kesalahan yang dilakukan oleh para personalnya hanya akan berdampak buruk dan negatif terhadap manajemen sekolah. Sanksi hanya akan diberikan, jika betul-betul ada bukti dan tidak mungkin lagi untuk dibina, jauh lebih efisien membentuk perilaku guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya dengan menghargai hasil yang positif dan memberikan motivasi ke arah yang positif pula.

d) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan, sering disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan.

Pengendalian merupakan usaha untuk mengetahui sejauhmana perencanaan yang dibuat itu tercapai secara efektif dan efisien, serta diadakannya evaluasi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan tersebut. Kemudian diadakan atau dicarai langkah-langkah alternatif untuk permasalahan-permasalahan atau tujuan

yang belum tercapai secara maksimal (*feed back*), dan diadakan tindak lanjut (*follow up*) bagi tujuan yang telah tercapai.

Pada dasarnya perencanaan dan pelaksanaan merupakan suatu kesatuan tindakan. Walaupun hal ini terjadi, sedangkan pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai.

Menurut Murdick dalam Fattah (2005: 101) mengatakan, pengawasan merupakan proses dasar yang esensialnya tetap diperlukan bagaimanapun rumitnya dan luasnya suatu organisasi. Sedangkan proses dasarnya terdiri dari tiga tahap: (1) menetapkan standar pelaksanaan, (2) pengukuran pelaksanaan pekerjaan di bandingkan dengan atndart dan (3) menentukan kesenjangan (*devisi*) antara pelaksanaan dan suatu rencana.

Bagaimanapun baiknya suatu kegiatan yang di lakukan teraturnya kordinasi yang di lakukan dalam suatu organisasi bila semua itu tidak dilakukan dengan upaya pengontrolan, maka tujuan yang ingin diharapkan tidak akan tercapai dengan sempurna. Kegiatan pengontrolan ini dilakukan guna untuk mengetahui kinerja suatu lembaga yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan semula, serta untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dalam waktu tertentu.

Stoner (1982) dalam Sagala (2011: 61) membagi pengawasan dalam empat langkah, yaitu: (1) menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi, langkah ini mencakup

penetapan standar dan ukuran untuk segala macam keperluan, mulai dari target pencapaian kurikulum sampai pada target pencapaian mutu lulusan; (2) mengukur prestasi kerja, langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang (*repetitif*) yang frekuensinya tergantung jenis aktivitas yang sedang diukur; (3) membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil-hasil itu memenuhi standar, kepala sekolah dapat mengasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali; dan (4) mengambil tindakan korektif, jika hasil-hasil yang dicapai tidak memenuhi standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan korektif ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi sekolah, atau terhadap standar yang telah ditetapkan semula.

Sagala (2011: 67) mengemukakan bahwa, kegiatan pengawasan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu kerjasama antara guru, kepala sekolah, konselor, supervisor, dan petugas sekolah lainnya dalam institusi sekolah. Data itu dipakai untuk mengidentifikasi apakah proses pencapaian tujuan melalui proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Proses kerjasama pendidikan harus dinilai untuk melihat apakah tujuan yang harus ditetapkan tercapai, dan kalau tidak

apakah hambatan-hambatannya, penilaian ini dapat berupa proses kegiatan atau hasil kegiatan. Faktor-faktor seperti kemangkiran personal, penerapan model-model mengajar (seperti: cara belajar siswa aktif, *link and mach*, kurikulum, dan sebagainya), keamanan sekolah, performansi guru dan tenaga kependidikan, kualitas layanan belajar, hubungan dengan masyarakat dan *stakeholder* sekolah, mutu lulusan, dan sebagainya, semua ini merupakan aktivitas penting pada tiap unit kerja sekolah yang harus diawasi. Kualitas lulusan misalnya, biasanya akan diawasi dengan metode pengawasan kualitas menggunakan ilmu statistik.

b. Teori Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi dan Masyarakat

Dalam pengertian yang paling dikenal secara luas dan sederhana bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang terhadap satu kegiatan seperti Moeliono memberikan definisi singkat tentang partisipasi yang berarti berperan serta dalam suatu kegiatan (Moeliono, 1990: 978).

Dalam wacana pembangunan, Kikkelsen (1999) dalam Soetomo (2006), menginventarisir ada enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi. *Pertama*; partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. *Kedua*; partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan

kemampuan menanggapi proyek–proyek pembangunan. *Ketiga*; partisipasi adalah proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. *Keempat*; partisipasi adalah pematapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. *Kelima*; partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. *Keenam*; partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka (Soetomo, 2006: 84).

Selain beberapa pengertian di atas, ada pengertian partisipasi yang lebih bersifat dorongan internal dari dalam diri partisipan (masyarakat) dan juga adanya peluang dari penyelenggara pembangunan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Slamet yakni partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) Adanya kemauan, (2) Adanya kemampuan dan (3) Adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992: 58).

Sedangkan Koentjoroningrat menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam dua tipologi ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi

keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya (Koentjoroningrat, 1998: 90). Adapun Thoha dalam Indrafachrudi, menggolongkan partisipasi masyarakat kedalam tiga kelompok yakni partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi dan partisipasi seremoni. Agar partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, maka persiapan anggota staf dengan pengetahuan tentang masyarakat, sejarahnya, tradisinya, kepercayaannya, kehidupan sosial ekonominya, bentuk pemerintahan satuan-satuan komunikasi dalam masyarakat, kepemimpinan dan kesadaran berorganisasi masyarakat tersebut (Sukarto, Indrafachrud, 1994: 17).

Sebagaimana teori partisipasi dalam pembangunan berdasarkan model *People Centered Development* (Korten, 1983) dalam Strategi ini konsep partisipasi cukup memberi keuntungan karena:

- a) Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan
- b) Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam pembangunan
- c) Pelaksanaan pembangunan makin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- d) Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas meskipun data terbatas

e) Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah (Muhadli, Zulkifli, 2009: 9).

Dikenal ada dua pendekatan dalam pengembangan suatu lembaga yakni pendekatan dari atas ke bawah (*top down strategy*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up strategy*) (Soetomo, 2006: 40). Dalam konteks partisipasi tentu saja pendekatan *bottom up* (dari bawah keatas) lebih tepat diterapkan. Pendekatan ini bertumpu pada kekuatan yang bersumber dari bawah yakni masyarakat sebagai komponen pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dituntut secara aktif menyumbangkan perannya dalam proses pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Maka dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan anggota masyarakat (orang tua siswa, masyarakat umum maupun masyarakat sekolah) dalam membantu dan bekerjasama untuk kesuksesan program sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Adapun masyarakat (*community*) adalah kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem, adat istiadat, dan hukum yang berlaku (Mubaroh, Zulfi, 2006: 5). Dalam pengertian lain yang hampir senada dikemukakan oleh Abdul Latif (2009) dalam bukunya Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, menyebutkan pengertian masyarakat sebagai sekumpulan orang yang hidup disuatu wilayah yang memiliki

aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain. pola hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang umumnya tidak diverbalkan.

Dalam konteks sekolah atau sekolah, masyarakat adalah warga atau individu yang berada di sekolah atau sekolah dan disekitar sekolah yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap manajemen sekolah atau sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap lembaga. Masyarakat pendidikan adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pendidikan, sehingga lazim muncul pernyataan tentang *stake holder* atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan tugas itu (Pidarta, Made, 1997: 72).

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya dalam program sekolah ada lima prinsip yang harus diperhatikan oleh komite sekolah atau majlis sekolah sebagaimana dikemukakan oleh Maisyaroh (2000) antara lain: (a) fleksibilitas; (b) relevansi; (c) partisipasi; (d) komprehensif; dan (e) melembaga.

a) Fleksibelitas

Lembaga mempunyai program-program yang cukup lentur dan beradaptasi secara terus menerus dengan perubahan-perubahan layanan lembaga lain yang ada di masyarakat.

b) Relevansi

Peran dan fungsi dari lembaga pendidikan hendaknya sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang siswa.

c) Partisipasi

Lembaga pendidikan melibatkan masyarakat dalam mengembangkan program kegiatan dan layanan guna memperluas, memperbaharui dan memadukan berbagai pengalaman.

d) Komprehensif

Lembaga pendidikan senantiasa menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang lebih luas, intern bangsa maupun secara internasional.

e) Melembaga

Lembaga pendidikan harus senantiasa dikelola secara baik, sehingga mampu menunjukkan keberhasilan, karena pada umumnya partisipasi masyarakat akan muncul bila lembaga pendidikan tersebut mampu menunjukkan eksistensinya dan keberhasilannya.

Pada dasarnya keterlibatan atau partisipasi orang tua dan masyarakat dalam sekolah setidaknya dilandasi oleh tiga alasan

sebagaimana yang dikemukakan oleh Gorton dalam Julianto (2003), yakni:

- a) Melalui partisipasi orang tua dan masyarakat akan menjadi lebih mengenal apa yang dipelajari murid-murid di sekolah, lebih memahami problematika yang dihadapi sekolah, lebih mendukung upaya untuk memajukan program pendidikan.
- b) Melalui partisipasi orang tua dan masyarakat sekolah akan menerima ide-ide sumber daya manusia yang akan memajukan pendidikan.
- c) Melalui partisipasi orang tua dan masyarakat akan lebih muda untuk mengevaluasi sekolah secara terbuka dan efektif.

c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan anggota masyarakat dalam membantu dan bekerja sama dengan sekolah sehingga program sekolah dapat berjalan lancar dan lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ahmad, 1994: 13)

Made Pidarta (2004: 46) menyebutkan beberapa wadah partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain: a) Dewan pendidikan, b) Komite sekolah, c) Persatuan orang tua siswa, d) Perkumpulan olah raga, e) Perkumpulan kesenian, f) Organisasi-organisasi lain.

Sedangkan bidang partisipasi antara lain: a) Kurikulum lokal, b) Alat-alat belajar, c) Dana, d) Material atau bangunan, e) Auditing

keuangan keuangan, f) Control kegiatan-kegiatan sekolah, g) Dan sejenisnya.

Adapun cara berpartisipasi antara lain: a) Ikut dalam pertemuan, b) Datang ke sekolah, c) Lewat surat, d) Lewat telpon, e) Ikut malam seni, f) Ikut bazaar, g) Dan sejenis.

Menurut penelitian Muhsin (2004: 23), bahwa jenis partisipasi yang disumbangkan masyarakat sangat beragam, seperti:

- a) Partisipasi material bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi.
- b) Partisipasi pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan
- c) Partisipasi tenaga/fisikal bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pemikiran tetapi memiliki kepedulian dalam membantu sekolah
- d) Partisipasi moral dalam bentuk dukungan penuh oleh berbagai lapisan masyarakat dalam memotivasi perjuangan agama Islam.

Ukuran partisipasi masyarakat menurut Fattah (2004: 51) diukur dengan keikutsertaan masyarakat menanggungbiaya sekolah baik yang masuk kategori bantuan pembangunan yang populer dengan istilah Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun iuran bulanan peserta didik. Partisipasi yang berlaku universal adalah kerjasama yang erat antara perencanaan di sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan kualitas sekolah. Kerangka merekonstruksi partisipasi menurut Uphoff (1997: 64), mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan dan lingkungan. Partisipasi berkembang menjadi: (a) partisipasi dalam mengambil kebijaksanaan dalam

mengambil keputusan, (b) partisipasi dalam melaksanakan, (c) partisipasi memperoleh keuntungan, dan (d) partisipasi dalam mengevaluasi.

2. Kajian Teori tentang Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Secara etimologi, selama ini pendidikan Islam telah memperkenalkan paling kurang tiga kata yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yaitu: *al tarbiyah*, *al ta'lim*, dan *al ta'dib*. Jika ditelusuri ayat-ayat Al Qur'an dan matan As Sunnah secara mendalam dan komprehensif sesungguhnya selain tiga kata tersebut masih terdapat kata-kata lain yang berhubungan dengan pendidikan. Kata-kata lain tersebut yaitu: *al tahdzib*, *al muwa'idzah*, *al Riyadhah*, *al tazkiyah*, *al tafaqquh*, dan sebagainya (Nata, Abuddin, 2010:7).

1) *Al Tarbiyah*

Kata *al tarbiyah* berasal dari kata *rabba*, *yarubbu*, *rabban*, yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh (anak) (Yunus, Mahmud, tt: 136). Kata kerja *rabba* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad Saw, seperti terlihat dalam ayat al Qur'an dan al Hadits. Dalam ayat Al-Qur'an kata ini digunakan dalam susunan berikut ini:

Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi istilah *al tarbiyah* mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, sebab didalamnya tercakup upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang

lebih sempurna, mencapai kebahagiaan hidup, cinta tanah air, memperkuat fisik, menyempurnakan etika, sistematisasi logika berpikir, mempertajam intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi terhadap perbedaan, fasih berbahasa, serta mempertinggi ketrampilan (Al Abrasyi, Muhammad Athiyah, 1990: 7).

Pengertian *al tarbiyyah* dapat diringkas sebagai proses yang berkelanjutan dalam membentuk individu baik dari segi fisik, intelektual, emosional, spiritual untuk mencapai kesempurnaan hidup. Proses ini akan mendidik mereka untuk menghayati nilai-nilai yang sesuai untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2) *Al Ta'lim*

Kata *al ta'lim* jamaknya adalah *ta'alim*. Mahmud Yunus mengartikan *al ta'lim* adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih (Yunus, Mahmud, tt: 278). Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha mengartikan *al ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu (Ridha, M. Rasyid, 1373 H: 262).

Sementara itu, Quraisy Shihab ketika mengartikan kata *yua'llimu* dengan arti mengajar yang intinya tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika (Shihab, Quraish, 1996: 172).

Kata *al ta'lim* dalam arti pengajaran yang merupakan dari bagian pendidikan banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan

yang bersifat non formal, seperti majelis ta'lim yang saat ini berkembang dan bervariasi.

3) *Al Ta'dib*

Kata *al ta'dib* berasal dari kata '*addaba, yu'addibu, ta'diban*. Kata *al ta'dib* juga berasal dari kata adab yang berarti beradab, bersopan santun, tata karma, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika (Yunus, Mahmud, tt: 36). *Ta'dib* yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang-orang yang berpendidikan adalah orang-orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan (Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir, 2006: 20).

Al Naqib Al Attas lebih memilih kata *al ta'dib* untuk arti pendidikan. Menurut beliau, *ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan keagungan Tuhan (al Attas, Muhammad al Naquib, 1988: 61).

4) *Al Tahdzib*

Kata *al tahdzib* secara harfiah berarti pendidikan akhlak atau menyucikan diri dari perbuatan akhlak yang buruk, dan berarti pula terdidik atau terpelihara dengan baik, dan berarti pula yang beradab

sopan (Yunus, Mahmud, tt: 481). Secara keseluruhan kata *al tahdzib* terkait dengan perbaikan mental spiritual, moral dan akhlak, yaitu memperbaiki mental seseorang yang tidak sejalan dengan ajaran atau norma kehidupan menjadi sejalan dengan ajaran atau norma; memperbaiki perilakunya agar menjadi baik dan terhormat, serta memperbaiki akhlak dan budi pekertinya agar menjadi berakhlak mulia (Nata, Abuddin, 2010: 16). Berbagai kegiatan tersebut termasuk bidang kegiatan pendidikan. Itulah sebabnya, kata *al tahdzib* juga berarti pendidikan.

5) *Al Tadrīs*

Kata *al tadrīs* berasal dari *darrasa, yudarrisu, tadrīsān* yang dapat *berarti* pengajaran atau mengajarkan, perintah, kuliah (Yunus, Mahmud, tt: 126). Selain itu, kata *al tadrīs* juga berarti sesuatu yang pengaruhnya membekas, dan menghendaki adanya perubahan pada diri seseorang (Nata, Abuddin, 2010: 21). Intinya, kata *al tadrīs* berarti pengajaran, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang selanjutnya member pengaruh dan menimbulkan perubahan pada dirinya.

Istilah-istilah yang dijelaskan di atas merupakan pengertian pendidikan Islam secara etimologi. Seberapapun besar istilah yang dikemukakan oleh para ahli dalam perumusan peristilahan pendidikan Islam pada prinsipnya mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka mencoba merumuskan hakikat pendidikan Islam berdasarkan ciri-ciri

atau indikator yang dapat ditangkap. Berdasarkan ciri-ciri atau indikator itu mereka menggeneralisasi suatu konsep atau teori sambil menawarkan istilah yang cocok untuk digunakan dalam peristilahan pendidikan Islam. Atas dasar pemikiran ini, perumusan istilah pendidikan Islam hanyalah ijtihad yang kesemua istilah itu dapat diterima menurut perspektifnya masing-masing.

Dalam kajian ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah *al tarbiyah*, karena pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada usia, materi, ruang, dan metode tertentu saja, melainkan pendidikan Islam yang komprehensif dan seimbang. Dengan kata lain, konsep *al tarbiyah* adalah proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Ia juga meliputi proses mengurus dan mengatur supaya kehidupan berjalan dengan lancar. Termasuk di dalam konsep *al tarbiyah* ini dalam bentuk fisik, spiritual, material, dan intelektual.

Tarbiyyah dapat juga digunakan untuk istilah pendidikan sejak dalam ayunan hingga akhir kehidupan di dunia yang menyentuh aspek pendidikan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual.

Sedangkan secara termilogi, Ahmad Marimba mengungkapkan pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain, seringkali beliau menyatakan kepribadian utama dengan istilah kepribadian

muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam (Marimba, Ahmad D., 1980, 23).

Selanjutnya Naquib Al Attas menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tidak tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan (al Attas, M. Naquib, 1980:10).

Muhammad Ibrahimi menyatakan bahwa pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam (Arifin, 2003: 5). Dalam pengertian ini menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem, yang didalamnya terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesatuan system akidah, syari'ah dan akhlak yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik, yang mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya sangat bergantung keberartiannya. Pendidikan Islam juga berlandaskan ideologi Islam, sehingga pendidikan Islam tidak bertentangan dengan norma dan nilai dasar ajaran Islam.

Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam dengan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi-profesi asasi dalam masyarakat (al Syaibani, Omar Muhammad al Toumi, 1999: 399). Dalam pengertian ini lebih ditekankan pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menjadi baik, minimal menjadi maksimal, potensial menjadi aktual, dan dari yang pasif menjadi aktif. Tingkah laku tersebut dirubah dengan cara melalui proses pengajaran. Perubahan tingkah laku ini tidak saja berhenti pada level individu (etika personal) yang manghasilkan kesalehan individual, tapi juga mencakup level masyarakat (etika sosial) yang menghasilkan kesalehan sosial.

Semua pemikiran para pakar di atas memberikan suatu stimulasi agar pendidikan Islam tujuannya benar-benar di arahkan untuk mendidik budi pekerti dan jiwa, mengandung pelajaran akhlak. Pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang di ajarkan karena mengandung kelezatan-kelezatan rohani untuk dapat sampai kepada hakikat ilmiah dan akhlak yang terpuji.

b. Tujuan Pendidikan Islam

Berbicara tujuan pendidikan Islam, tentunya kita akan berpikir bagaimana tujuan hidup manusia. Sebab pendidikan hanyalah satu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya

(*survival*) baik individu maupun sebagai masyarakat (Tadjab, 1994: 55). Tujuan Pendidikan Islam diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Tujuan pendidikan jasmani dengan keterampilan fisik, yaitu untuk mempersiapkan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi melalui keterampilan fisik.
- 2) Tujuan pendidikan rohani, yaitu untuk meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya menyembah Allah Swt semata dan melaksanakan moralitas islami yang diteladani dari Rasulullah Saw.
- 3) Tujuan pendidikan akal, yaitu pengarahan kecerdasan untuk kekuasaan Allah Swt dan menentukan pesan ayat-ayat-Nya yang berimplikasi kepada peningkatan iman dan takwa kepada dan pencinta. Hal ini meliputi tiga tahapan yaitu: pencapaian kebenaran ilmiah (*'ilm al-yaqin*), pencapaian kebenaran empiris (*'ain al-yaqin*), dan pencapaian kebenaran meta empiris (*haqq al-yaqin*).
- 4) Tujuan pendidikan sosial, yaitu membentuk kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial.
- 5) Tujuan pendidikan karir, yaitu untuk mempersiapkan anak didik dalam memasuki dunia kerja dan karir (Abd. Rahman, 1999: 137).

c. Sumber-sumber Pendidikan Islam

Menurut Hasan Langgulung, bahwa sumber pendidikan Islam yaitu: al Qur'an, as Sunah, ucapan para sahabat (*madzhab al shahabi*),

kemaslahatan umat (*mashalih al muarsalah*), tradisi atau adat yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat (*al 'urf*), dan hasil ijtihad para ahli (Langgulong, Hasan: 1980, 35). Selain dari itu, ada pula yang meringkaskan sumber pendidikan Islam menjadi empat macam, yaitu: Al Qur'an, As Sunah, sejarah, dan filsafat (Nata, Abuddin, 2005: 59).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber pendidikan Islam secara umum terbagi menjadi dua. *Pertama*, sumber primer, yaitu al Qur'an dan as Sunah. *Kedua*, sumber sekunder, yaitu sejarah, pemikiran para sahabat, para filsuf, 'urf, dan tradisi yang tidak bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunah.

d. Kurikulum Pendidikan Islam

Di kalangan para ahli pendidikan, kajian terhadap kurikulum senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga cakupan kurikulum dengan berbagai aliran, madzhab, pendekatan, dan coraknya amat beragam. Sebagai agama yang terbuka dan dinamis, Islam mengajarkan agar kurikulum tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa suatu kurikulum mengandung atau terdiri atas komponen-komponen: 1) tujuan, 2) isi, 3) metode dan proses belajar mengajar, 4) evaluasi. Setiap komponen dalam kurikulum di atas sebenarnya saling berkaitan, bahkan masing-masing

merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut (Tafsir, Ahmad, 1994: 54).

Selanjutnya, S. Nasution menyebutkan asas-asas yang terdapat dalam kurikulum yaitu: asas filosofis, sosiologis, organisatoris, dan psikologis (S. Nasution, 1991: 112). Asas-asas ini juga digunakan sebagai asas kurikulum pendidikan Islam, karena kurikulum pendidikan Islam membutuhkan jasa filsafat, sosiologi, organisasi, psikologi, dan ilmu lainnya. Dengan berbagai disiplin ilmu tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam akan dapat dijabarkan secara lebih luas dan sesuai kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Pendidik dalam Pendidikan Islam

Di dalam al Qur'an dan as Sunah yang merupakan sumber utama pendidikan Islam, terdapat sejumlah istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik dan masing-masing mempunyai peranan yang berbeda. Istilah tersebut antara lain: 1) ketika berperan sebagai orang yang menumbuhkan, membina, dan mengembangkan potensi anak didik serta membimbingnya maka ia disebut *al murabbi*; 2) ketika berperan sebagai pemberi wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan, ia disebut *al muallim*; 3) ketika ia membina mental dan karakter seseorang agar memiliki akhlak mulia, maka ia disebut *al muzakki*; 4) ketika berperan sebagai peneliti yang berwawasan transcendental serta memiliki kedalaman ilmu agama dan ketakwaan

yang kuat kepada Allah, ia disebut *al ulama*; 5) ketika dapat berpikir secara mendalam dan menangkap makna yang tersembunyi, maka ia disebut *al rasikhum fil al 'ilm*; 6) ketika tampil sebagai pakar yang mumpuni dan menjadi tempat bertanya dan rujukan, ia disebut *ahl al dzikr*; 7) ketika ia dapat menyinergikan hasil pemikiran rasional dan hasil perenungan emosional, maka ia disebut *ulul al bab*; 8) ketika ia dapat membina kader-kader pemimpin masa depan bangsa yang bermoral, maka ia disebut *al muaddib*; 9) ketika ia menunjukkan sikap yang lurus dan menanamkan kepribadian yang jujur dan terpuji, maka ia disebut *al mursyid*; 10) ketika ia berperan sebagai ahli agama, maka ia disebut fakih (Nata, 2010: 165).

f. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam

Di dalam ajaran Islam, terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik. Istilah tersebut antara lain: *tilmidz* (jamaknya *talamidz*), murid, *thalib* (jamaknya *al thullab*), dan *muta'allim*.

Secara etimologi kata *tilmidz* (jamaknya *talamidz*) yang berarti murid laki-laki, atau *tilmidzah* (jamaknya *talamidzah*) yang berarti murid perempuan (Yunus, Mahmud, tt: 79). Istilah ini digunakan untuk menunjukan peserta didik pada tingkat sekolah awaliyah atau sekolah permulaan. Kata *murid* adalah *isim fa'il*, yang berasal dari kata *arada*, *yuridu*, *muridan*, yang berarti orang yang menghendaki sesuatu. Istilah murid digunakan bagi pengikut ajaran tasawuf, dan berarti orang yang mencari hakikat kebenaran spiritual di bawah di bawah bimbingan dan

arahan pembimbing spiritual (*mursyid*) (Majid, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, 2006: 104). Istilah ini digunakan pada sekolah tingkat dasar, mulai Ibtidaiyyah sampai Aliyah.

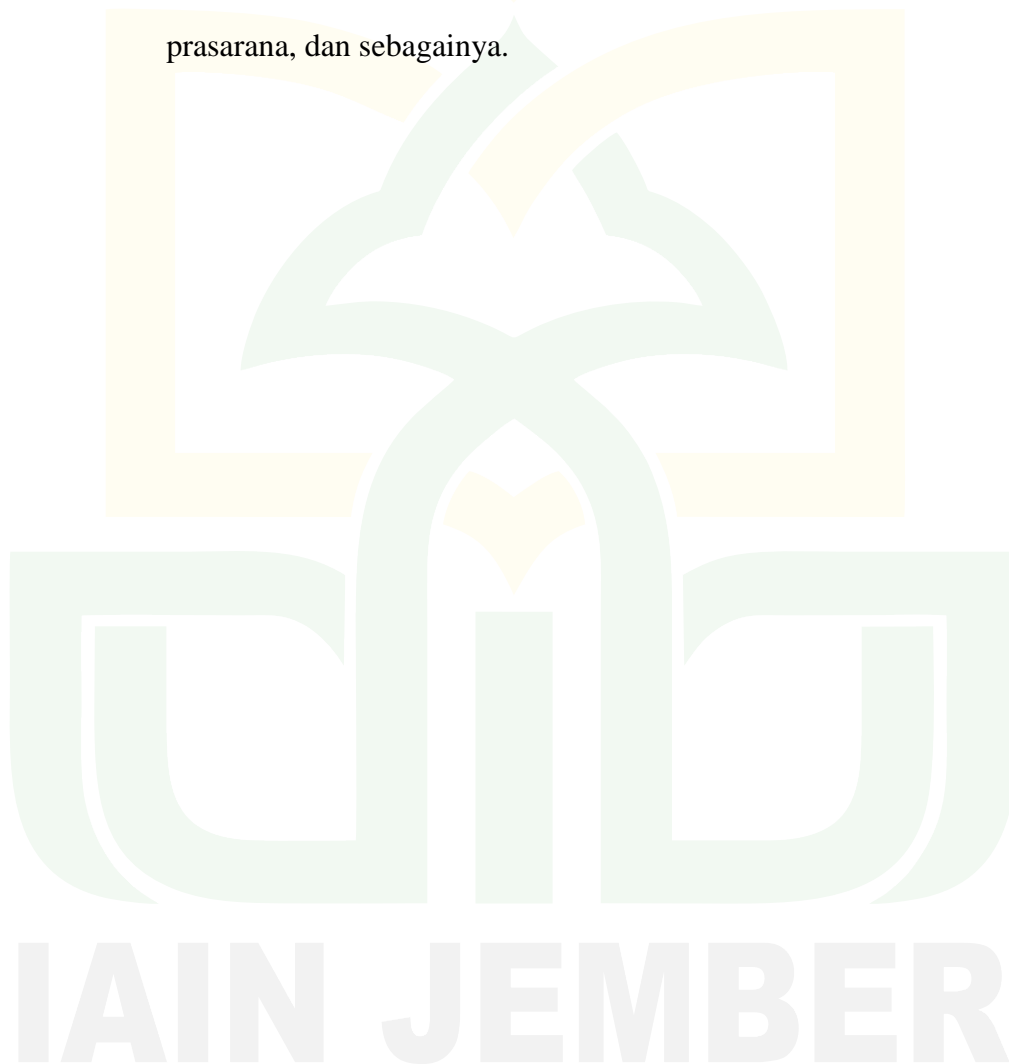
Istilah *thalib* berasal dari kata *thalaba*, *yathlubu*, *thalaban*, *thaliban*, yang berarti orang yang mencari sesuatu. Menurut istilah tasawuf, *thalib* adalah orang yang menempuh jalan spiritual dengan cara nempa dirinya dengan keras untuk mencapai derajat sufi. Istilah *thalib* digunakan pada tingkat perguruan tinggi. Istilah *muta'allim* berasal dari kata *allama*, *yu'allimu*, *muta'alliman*, yang berarti orang yang sedang menuntun ilmu.

g. Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan Islam

Dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan, dan mengetahui pula tingkat perubahan perilakunya. Evaluasi juga bertujuan mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan kurang cerdas. Lebih dari itu, sasaran evaluasi tidak hanya bertujuan mengevaluasi peserta didik saja, melainkan juga bertujuan mengevaluasi pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pendidikan (Nata, Abudin, 2010: 166).

Adapun pengembangan terkait dengan upaya memperbaiki, meningkatkan, dan memajukan suatu kegiatan dari keadaan yang

kurang maju kepada keadaan yang lebih maju. Dalam bidang pendidikan, pengembangan dapat dilakukan pada seluruh komponen pendidikan, antara lain: pengembangan mutu sumber daya manusia (khususnya guru), pengembangan kurikulum dan materi pelajaran, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sarana prasarana, dan sebagainya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjangkau informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris (Sugiyono, 2008: 9).

Nasution (1995) mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Menurut Strauss dan Corbin (1990), salah satu kelebihan penelitian kualitatif adalah karena ia bisa digunakan menjelaskan detail yang rumit dari suatu fenomena yang sulit dijelaskan jika menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari organisasi, kelompok maupun individu. Jenis penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik.

Menurut Sugiyono (2008: 207), gejala itu bersifat holistik (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak akan menetapkan

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam pembatasan masalah (fokus) lebih didasarkan pada tingkat kepentingan urgensi dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu.

Teori dalam penelitian kualitatif sebagai bekal wawasan dan memudahkan peneliti dalam membuat instrument penelitian yang baik untuk dapat memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Bahwa masalah dalam kuantitatif sudah harus jelas, spesifik, dan tidak berubah sampai proposalnya dilakukan di lapangan, tetapi pada masalah kualitatif itu belum jelas (bersifat sementara), tentatif, dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Dalam masalah batasan masalahpun juga sama bahwa dalam kuantitatif yang membatasi penelitian dalam satu variable atau lebih dari satu variable yang akan membuktikan suatu teori dalam penelitian yang dilakukan, sedangkan kualitatif masih berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dan mencari suatu teori yang baru (Sugiyono 2008: 213).

Lexy Moleong (2007: 8), mengatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendiskripsikan dengan bahasa dan kata pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau fenomena alam secara sistematis, faktual dan akurat. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari suatu proses yang diamati. Data yang muncul yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka didapatkan dalam beberapa cara, yaitu: observasi, wawancara, intisari dokumen, atau dengan cara lain yang biasanya diproses dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992:15-16).

Dengan demikian, peneliti akan berhubungan langsung dengan sumber data penelitian dan memerlukan komunikasi yang lebih mendalam dengan sumber data agar semua pertanyaan penelitian dapat dieksplorasi dengan sempurna. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan manajemen partisipasi masyarakat. Oleh karena itu seluruh unsur terkait dengan fokus penelitian akan menjadi perspektif penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan lokasi di SDN Mlokorejo II, tepatnya di Jl. Kencong No. 44 Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger merupakan sekolah umum, namun tetap memperhatikan pengembangan pendidikan agama Islam yang selalu melibatkan masyarakat.
- b. SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger telah memprioritaskan program-program terkait dengan partisipasi masyarakat, dengan cara menyusun program kerja urusan hubungan masyarakat.
- c. Masyarakat di sekitar SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger ikut berpartisipasi secara suka rela dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah, baik berupa materi maupun non-materi, tanpa ada paksaan.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan dengan cara *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008:218).

Informan awal diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya

sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Artinya, bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah informan sudah cukup (sebagai informan terakhir) karena informasinya sudah jenuh (kebanyakan jawaban yang sama).

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan awal adalah Kepala SDN Mlokorejo II. Kemudian, dari informan awal tersebut berlanjut kepada informan lain dengan cara penunjukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Teknik tersebut diantaranya:

1. Wawancara Mendalam

Secara umum dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara secara mendalam. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam dari suatu masalah dengan jumlah responden yang sedikit. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode campuran (semi struktur), yaitu mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.

Tahapan wawancara ini dilakukan dengan: (1) mempersiapkan wawancara; (2) melakukan wawancara yang produktif; (3) mengakhiri dengan rangkuman hasil wawancara. Pelaksanaan wawancara ini merujuk pada rancangan terstruktur yang berupa pedoman wawancara. Hasil wawancara dirangkum secara langsung dari catatan-catatan yang dibuat di tempat penelitian, diringkas dan diberi kode-kode yang mudah dimengerti oleh peneliti.

Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah:

- a. Manajemen partisipasi masyarakat yang ada di SDN Mlokorejo II.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen partisipasi masyarakat yang ada di SDN Mlokorejo II.
- c. Bentuk-bentuk manajemen partisipasi masyarakat yang ada di SDN Mlokorejo II, dan sebagainya.

2. Dokumentasi

Menurut Usman (2006:73), studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumenter digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi, terutama yang berada di lingkungan obyek penelitian dalam hubungannya dengan penerapan manajemen partisipasi masyarakat.

Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkapkan aktifitas dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap masalah-masalah yang diteliti. Studi dokumentasi ini memungkinkan

ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi dapat mengkonfirmasi dengan bentuk wawancara kembali dengan narasumber yang terdahulu.

Studi dokumentasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang dapat berupa foto, buku-buku, modul, jurnal, piagam, dan sebagainya yang diperoleh saat wawancara maupun observasi dilakukan.

Adapun data yang diambil dari metode dokumentasi adalah:

- a. Latar belakang dan sejarah SDN Mlokorejo II.
- b. Data-data tentang personal di SDN Mlokorejo II.
- c. Data-data tentang inventarisir SDN Mlokorejo II.
- d. Data-data prestasi belajar SDN Mlokorejo II, dan sebagainya.

3. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki (Sugiyono, 2008:145). Metode ini merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung melalui fakta dan data yang ada, jadi dalam penerapan metode ini dilakukan pencatatan khusus secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki terkait dengan bukti fisik di lapangan yang ditemukan peneliti.

Tahapan observasi menurut Basrowi dan Suwandi (2008:98) terdiri dari: pengamatan deskriptif, pengamatan terfokus, dan pengamatan

terseleksi. Pengamatan deskriptif dilakukan pada tahap eksplorasi secara umum, memperhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek elemen situasi sosial yang diamati sehingga diperoleh gambaran secara umum. Pengamatan terfokus merupakan kelanjutan dari pengamatan deskripsi yang lebih fokus terhadap detail suatu ranah yang diteliti. Pengamatan terseleksi merupakan pengamatan yang mengamati komponen tertentu untuk mendapat data yang diperlukan dalam analisis setiap perspektif.

Pelaksanaan observasi memerlukan rancangan yang sistematis, penyesuaian dengan tujuan penelitian, pencatatan dalam bentuk pencatatan lapangan, dan pengendalian terhadap hasil penelitian sehingga diperoleh validitas dan reliabilitasnya. Pelaksanaan observasi ini disusun dalam suatu tabel pedoman observasi yang memuat unsur-unsur, sasaran penelitian, dan pertanyaan observasi.

Adapun data yang diambil dari metode observasi ini adalah keberadaan dan penerapan manajemen partisipasi masyarakat yang ada di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, yaitu suatu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka, walaupun ada sifatnya hanya sebagai penunjang. Deskriptif bersifat menjelaskan sehingga tidak terjadi kekaburan atau kehilangan makna, penyimpangan data, apa adanya dengan tetap menjaga netralitas agar peneliti

tidak terjerembab terhadap dampak yang mengacu pada ketidakobjektifan data yang diperoleh.

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data dilakukan. Sugiyono (2008: 246) menjelaskan, di dalam melakukan analisis data mengacu kepada tahapan berikut, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini, yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Mencatat data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) baik dari observasi, *field note*, rekaman wawancara, serta dokumen ke dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada indikator dari sub-variabel.
- b. Pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu tabel.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan keadaan dan perspektif antar informan mengenai fokus penelitian,

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang bersifat komprehensif, dimana komponen yang satu berkaitan dengan komponen yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode yang sistematis. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan gambaran tentang manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II.

Langkah awal dalam kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan tentang kondisi obyektif penerapan manajemen partisipasi masyarakat. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji teori, konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung studi pendahuluan di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sebagai bahan pertimbangan dalam mendeskripsikan temuan-temuan di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan tersebut kemudian dilakukan pengecekan ulang menggunakan triangulasi sumber untuk melihat keabsahan atau kebenaran data yang telah didapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian dan Analisis Data

1. Penerapan Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II

SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam, hal tersebut dapat dilihat dari budaya sekolah yang mengedepankan ke-Islaman di dalamnya. Tujuan yang digaungkan SDN Mlokorejo II adalah menghasilkan lulusan yang mandiri, kuat, cerdas, terampil, berbudi luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tujuan selanjutnya adalah membangun sumber daya unggul sebagai sarana bersaing lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan sekolah yang Islami dan modern dapat dilihat dari perencanaan yang digagas.

a. Perencanaan

Dalam upaya menjaring partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama Islam, selama ini sekolah sudah mencoba menerapkan prinsip perencanaan walaupun belum maksimal, misalnya program berjangka dengan penentuan skala prioritas dan sebagainya. Yang ada masih sebatas konsep program kerja dalam bidang kehumasan atau pembagian tugas bidang Humas di sekolah.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala SDN Mlokorejo II berikut: "...Di sini perencanaannya sudah ada walaupun masih harus menggunakan teknik penyusunan perencanaan yang baik, selama ini

sebatas membuat program kerja secara umum, nanti kita akan coba benahi setelah ini.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Seperti program kerja yang disusun oleh kepala sekolah yang diambil dari dokumen sekolah, antara lain isinya adalah:

Program Kerja Urusan Hubungan Masyarakat

1. Menyusun program partisipasi kemasyarakatan
2. Mengidentifikasi siswa berprestasi dan bermasalah
3. Menjalin hubungan dengan siswa, guru, dan semua warga
4. Menjalin hubungan dengan orang tua/wali
5. Menjalin hubungan dengan pengurus komite
6. Menjalin hubungan dengan dewan pendidikan
7. Mengikuti kegiatan kemasyarakatan
8. Menjalin hubungan dengan pemerintah
9. Menjalin hubungan dengan institusi swasta
10. Menjalin hubungan dengan sekolah lain
11. Menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar
12. Menyebarkan informasi sekolah
13. Mempromosi sekolah
14. Memberdayakan orang tua/wali terhadap pengembangan program (Dokumentasi SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Dalam dokumen sekolah memang terdapat Uraian Tugas Waka.

Hubungan Masyarakat yang terdiri dari empat poin yakni:

1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua wali siswa,
2. Membina hubungan antar sekolah
3. Membina hubungan antara sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya
4. Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala (Dokumentasi SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Dalam hubungan kerja dengan komite sekolah pun demikian, umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah maupun komite sekolah dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, selama ini cenderung bersifat insidental berdasarkan kebutuhan mendesak . Tidak ada program yang dilakukan melalui perencanaan yang benar-benar matang.

Saat kapan sekolah membutuhkan dana, saat itu orang tua kemudian diundang. Seperti yang diungkapkan oleh komite sekolah berikut ini:

“Kami tidak menyusun program kerja karena kami menunggu undangan sekolah, tapi kami terlibat dalam kepanitiaan sekolah, kami ngumpul setahun sekali pada awal tahun untuk membicarakan besaran sumbangan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, atau saat kelas VI mau ujian nasional untuk membicarakan mengenai les (belajar tambahan) anak-anak.” (Wawancara, Samijan, 05/02/2015).

Hasil observasi di lokasi penelitian, ditemukan bahwa pertemuan antara sekolah dan orang tua siswa sering kali bersifat dadakan dan tidak diagendakan. Namun demikian, hal itu tidak memudahkan hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, sebab kedua elemen tersebut telah mempunyai komitmen yang sama, yaitu mengembangkan dan memajukan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi tersebut dapat penulis analisis bahwa hubungan antara sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah, terjadi secara *konvensional*. Tidak berdasarkan suatu agenda yang disusun atau direncanakan sebelumnya. Karena memang kegiatan semacam ini tetap berlangsung setiap tahun.

b. Pengorganisasian

Secara organisatoris, pengelolaan partisipasi masyarakat adalah tanggungjawab kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala bidang Humas yakni bidang yang menangani masalah-masalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam hal ini bidang Humas-lah yang harus

mengelola partisipasi masyarakat/orang tua siswa. Selain bidang Humas ada pula satu lembaga yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan masuk dalam struktur organisasi sekolah yakni Komite Sekolah, yang mana lembaga ini bukan merupakan bawahan kepala sekolah sebagaimana lembaga-lembaga lain yang ditunjukkan oleh tidak terdapatnya garis *instruktif* dari kepala sekolah kepada Komite Sekolah tetapi Komite Sekolah merupakan mitra kerja sekolah yang ditunjukkan dengan adanya garis *koordinasi* dari kepala sekolah kepada Komite Sekolah atau sebaliknya. Disini Komite dengan sekolah bersifat *parthnership*.

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan bahwa dalam kaitannya dengan pembagian tugas dan wewenangan ini secara umum kondisi yang terjadi adalah bahwa struktur organisasi sekolah menunjukkan pembagian tugas yang jelas terhadap semua komponen yang ada. Khusus bidang yang menangani ke-Humas-an dijabat oleh wakil kepala sekolah yang khusus membidangi itu, seperti dalam struktur organisasi yang ada di SDN Mlokorejo II (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Namun apa yang peneliti saksikan di lapangan adalah bahwa persepsi masyarakat sekolah terhadap pekerjaan Humas ini belum *konfhensif*. Bidang ini cenderung masih sebatas melengkapi struktur organisasi yang ada di sekolah. Misalnya orang yang diamanahi memegang tugas kehumasan adalah seorang yang cukup *komunikatif* dengan masyarakat tetapi ada banyak tugas-tugas lain yang juga

diembannya selain tugas rutin sebagai guru bidang studi, sehingga pekerjaan-pekerjaan ke-Humas-an cenderung menjadi tugas “ke-sekian” (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Dalam sebuah wawancara dengan seorang guru yang membidangi Humas di SDN Mlokorejo II, mengatakan: “Program Humas ini belum maksimal kita pegang sebab banyak sekali pekerjaan yang kita tangani, *insyaallah* setelah ini kita akan benahi.” (Wawancara, Umar Sholeh, 09/02/2015).

Selain itu hal yang terjadi di lapangan menunjukkan indikasi ketidak-pahaman terhadap fungsi dan tugas yang ditangani. Hal ini juga masih berkaiatan dengan pembagian tugas (*job diskription*) yang tidak jelas antara komponen-komponen atau bidang-bidang yang menangani masalah ini. Misalnya, kebanyakan surat yang ditujukan kepada orang tua siswa hanya ditandatangani oleh kepala sekolah tidak melibatkan bidang Humas sebagai salah satu pengundang.

c. Pelaksanaan

Untuk mendapat gambaran tentang realisasi dan implementasi partisipasi masyarakat kondisi umum yang terjadi di lapangan menunjukkan ada implementasi partisipasi masyarakat dalam program sekolah. Berikut ini dipaparkan gambaran pelaksanaan partisipasi masyarakat yang ada di SDN Mlokorejo II.

1) Dukungan Moril

Pada kesempatan peneliti melakukan *home visit* bersama seorang guru SDN Mlokorejo II ke rumah salah satu siswa untuk memastikan keadaannya yang sejak beberapa hari lalu tidak hadir di sekolah. Dalam pertemuan dengan orang tua siswa siswa yang bersangkutan terjadi komunikasi yang serius antar pihak sekolah dengan orang tua yang akhirnya melahirkan sebuah komitmen untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap siswa yang bersangkutan agar kembali belajar seperti biasa (Observasi, SDN Mlokorejo II, 13/02/2015).

Hampir senada dengan hasil observasi di atas, ada partisipasi masyarakat yang terjadi dalam bentuk lain seperti pengawasan orang tua yang semakin marak di sekolah, seperti ungkapan Kepala SDN Mlokorejo II berikut ini:

“Ketika dilaksanakannya kegiatan belajar *kamp* (mengingat) di sekolah untuk melatih Qiyamullail dan shalat Dhuha bagi siswa-siswi ketika menjelang Ujian Nasional, orang tua ikut menunggu dan mengawasi anak-anak selama beberapa hari acara berlangsung, sambil membawa bekal makanan dan minuman untuk putra-putrinya, kelihatannya orang tua bersemangat sekali dalam hal ini.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

2) Dukungan Materiel

Dengan sumber pendanaan rutin dari dana BOS pengganti SPP cukup untuk mendanai proses pembelajaran selama ini. Sehingga harus diakui bahwa dukungan finansial hampir tidak lagi membebani orang tua. Paling minim ketika akhir tahun diadakan rapat pertemuan orang

tua siswa membicarakan dana tambahan untuk kegiatan setelah Ujian Nasional, seperti: rekreasi, tasyakuran, dan sebagainya (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

3) Hubungan Kerjasama

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar bagi perkembangan lembaga pendidikan. Begitu juga dengan sekolah, suatu sekolah bisa dikatakan sukses jika mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara orang tua, sekolah dan masyarakat.

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah mempunyai peran cukup besar terhadap berlangsungnya aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. suatu kenyataan bahwa masyarakat dikatakan maju karena pendidikan yang maju, dan sebaliknya masyarakat yang kurang kurang memperhatikan pembinaan pendidikannya, akan tetap terbelakang. Oleh sebab itu, dengan segala komponen yang ada di dalamnya, sudah seharusnya masyarakat terlibat dalam dunia pendidikan.

SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger dalam pengembangan pendidikan agama Islam telah melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat, yaitu: masyarakat yang terorganisir dan masyarakat umum.

a) Dengan Masyarakat Terorganisir

Program Humas yang dikembangkan oleh SDN Mlokorejo II tidak hanya sebatas hubungan dengan orang tua siswa, tetapi meliputi seluruh komponen yang ada di luar sistem SDN Mlokorejo II baik hubungan yang bersifat kedinasan maupun non kedinasan (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Adapun lembaga yang terjalin baik hubungannya selama ini dengan SDN Mlokorejo II antara lain:

- (1) Dinas Pendidikan kabupaten Jember. Hal ini tentu saja terus dijalin dengan baik karena harus berhubungan dalam hal-hal kedinasan dan administrasi, seperti penggajian guru, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun serta urusan-urusan administrasi lainnya dan kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, pengawasan, supervisi dan sebagainya.
- (2) SMP dan MTs. Hubungan yang dijalin dengan lembaga pendidikan di atasnya seperti SMP dan MTs selaku lembaga pengguna lulusan memang terus dikembangkan terutama dalam hal rekrutmen siswa baru, dengan saling menukar informasi tentang sistem rekrutmen yang dikembangkan di SMP dan MTs sehingga terjadi penjangkaran siswa secara kolektif.

(3) Selain itu adapula hubungan rutin yang terus dibina terutama dalam hal-hal yang bersifat *domestic* sekolah seperti dengan Bank Jatim, Kepala Desa, Telkom, PLN, dan sebagainya.

b) Hubungan dengan Masyarakat Umum

Adapun hubungan dengan masyarakat luas yang terjalin dengan rutin setiap tahun adalah melalui kegiatan safari dakwah pada setiap bulan Ramadhan dan kegiatan khutbah Jum'at yang dibina oleh Waka. Humas melalui pengurus masjid yang ada di sekitar SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Menurut hasil wawancara dengan Waka. Humas, bahwa: “Program safari Ramadhan ini bertujuan untuk membina bakat dan minat siswa dalam praktek nyata dan juga untuk promosi sekolah.” (Wawancara, Umar Sholeh, 09/02/2015).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Waka. Kesiswaan, yang mengungkapkan hal yang sama yakni:

“Anak-anak cukup berbakat dalam hal ini ketika mereka kita bawa dalam lomba-lomba pidato yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain mereka selalu mendapat juara, akhirnya dengan adanya kegiatan Safari Ramadhan ini bakat dan minat siswa dapat tersalurkan dengan baik terutama bulan Ramadhan.” (Wawancara, Inda Sulistiyani, S.Pd, 11/02/2015).

Dalam hal ini ditemukan bahwa di SDN Mlokorejo II terjadi komunikasi yang harmonis dengan beberapa lembaga (masyarakat terorganisir) yang menjadi mitra kerjasamanya,

sehingga partisipasi masyarakat terhadap sekolah sangat jelas terlihat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat telah berlangsung dari sejak sekolah ini berdiri hingga sekarang.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan dan evaluasi adalah bagian yang ikut menentukan sukses tidaknya sebuah program, bahkan evaluasi adalah *saving* informasi yang akan dijadikan rujukan bagi pengambilan kebijakan berikutnya. Pengawas dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SDM yang ditugaskan memiliki tanggungjawab atau tidak terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, apakah ia telah menunjukkan kinerja baik sehingga target organisasi dapat terwujud sesuai rencana atau tidak dan sebagainya.

Dalam pengamatan penulis fungsi manajemen yang satu ini sangat minim. Apa yang telah dilakukan berkaitan dengan program partisipasi berakhir begitu saja tanpa ada *saving* informasi yang dapat dijadikan bahan kajian untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Sehingga tidak tampak ada peningkatan kinerja dari waktu ke waktu (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Tanpa evaluasi kesinambungan program tidak bisa dijamin akan berlangsung dengan baik apalagi akan terjadi peningkatan kepada yang lebih baik. Sekali lagi hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa setiap kegiatan hanya bersifat konvensional menurut apa yang biasa dilakukan.

Namun yang dapat dijadikan *saving* informasi hanyalah berupa foto-foto kegiatan sebagai kenangan. Sekolah hanya dapat menyimpulkan bahwa terjadi penurunan semangat berpartisipasi masyarakat dari waktu ke waktu hingga saat ini. Terutama dalam hal partisipasi materi/uang.

Dari paparan di atas dapat ditemukan bahwa, walaupun belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen Humas secara maksimal, tetapi pelaksanaan partisipasi masyarakat sudah nyata terlihat. Dalam merealisasikan program-program fisik, sekolah menggunakan pendekatan *bottom up* dengan musyawarah sebagai metode utamanya. Sedangkan program *non fisik* (kurikuler) cenderung menggunakan pendekatan *top down* (menurut program baku sekolah).

2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, bahwa pelibatan masyarakat dalam program pendidikan menjadi isu penting dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Partisipasi menjadi bagian terpenting yang ikut menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan manajemen sekolah yang baik partisipasi itu harus terus digali dan dikembangkan. Dalam perjalanannya kemudian tentu sekolah akan menemukan beberapa kendala dalam hal ini.

Berdasarkan hasil temuan selama melakukan penelitian ini sedikitnya terdapat empat faktor yang ikut mempengaruhi motivasi berpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni:

a. Manajemen Sekolah

Berdasarkan hasil dokumentasi, terkait dengan pembagian tugas, dalam struktur organisasi sekolah, komite ditempatkan sebagai mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sana terbentang garis koordinasi yang jelas antara kepala sekolah dengan komite, kepala sekolah yang dalam hal ini dibantu oleh Waka. Humas (Dokumentasi SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Namun, berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa wewenang Humas cenderung menjadi tugas yang tidak terlalu diperhitungkan keberadaannya, bahkan terkesan jabatan Humas sebagai pelengkap struktur organisasi sekolah. Sehingga gairah untuk menjalankan tugas ini kurang menguat dan sangat sedikit yang dilakukan oleh bidang ini (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Demikian pula halnya dengan pengurus komite, umumnya yang terjadi selama ini adalah bahwa komite tidak terlalu memahami tugas dan fungsinya, seakan-akan berada di bawah komando sekolah. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, ketika terjadi wawancara dengan Komite Sekolah, beliau mengatakan bahwa, “Komite sekarang ini hampir tidak ada lagi yang dikerjakan, komite hanya menerima laporan dari sekolah saja.” (Wawancara, Samijan, 05/02/2015).

Lembaga komite sekolah seharusnya memiliki tugas dan wewenang yang melekat padanya, namun karena beberapa faktor

seperti tingkat pendidikan, kesibukan orang tua, dan sebagainya membuat kerja komite secara kelembagaan hampir tidak ada.

Permasalahan selanjutnya adalah tidak dilakukannya evaluasi kinerja sekolah, hal tersebut dikarenakan sekolah tidak memiliki data dan dokumen yang jelas tentang partisipasi masyarakat secara khusus atau dokumen kegiatan komite secara umum sehingga tidak dapat diukur sejauh mana capaian-capaiannya selama ini, untuk kemudian dapat dijadikan acuan bagi kerja-kerja berikutnya.

b. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Pribadi dan latar belakang seorang pemimpin sangat mempengaruhi sikap dan motivasi kerja orang yang dipimpin, sehingga akan berpengaruh pula pada realisasi sebuah kebijakan.

Bagaimana kemudian kepala sekolah mempunyai strategi menjaring partisipasi masyarakat untuk menyumbang, melalui kepiawaiannya memberi pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya berperan serta dalam pendidikan serta keutamaan-keutamaan dalam beramal jariyah. Seperti kutipan wawancara dengan kepala SDN Mlokorejo II yakni:

“Saya ingat banyak sarana sekolah yang dibangun dari hasil sumbangan orang tua siswa dan donatur, setelah mereka kita undang dalam rapat terbuka kemudian pihak sekolah mengungkapkan beberapa sarana yang masih kurang, saya cukup memberikan ceramah pencerahan selama 10 sampai 20 menit mengulas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan amal jariyah, bahwa ilmu yang bermanfaat termasuk amal jariyah, pendidikan yang baik yang didapatkan oleh putra-putri kita akan menjadikan mereka sebagai aset bangsa dan sumber pahala yang tiada putus-putusnya bagi orang tuanya baik di dunia maupun

akhirat. Saya katakan, bahwa membangun laboratorium sama juga nilainya dengan membangun mushallah, karena semuanya akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat, hal ini cukup menggugah motivasi mereka untuk berpartisipasi.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Selain itu adapula strategi kepemimpinan yang dilakukan kepala SDN Mlokorejo II, kepiawaiannya menjalin kerjasama dengan semua kalangan terutama masyarakat atau lembaga pemerintah membuat sekolahnya banyak dikunjungi orang-orang penting dan masyarakat luas, sehingga dengan mudah menginformasikan kondisi sekolah baik kemajuannya maupun kendala-kendalanya (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Beberapa strategi kepemimpinan yang dipaparkan di atas, cukup beralasan untuk membuat masyarakat luas tergugah motivasinya untuk berperan serta dalam program sekolah.

c. Latar Belakang Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua

Data dari bank data orang tua siswa menunjukkan tingkat ekonomi menengah ke bawah mendominasi latar belakang ekonomi orang tua siswa, tingkat ekonomi ini ditunjukkan dengan pekerjaan orang tua siswa yang sebagian besar bertani dan buruh tani, hanya sekitar 20% yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua siswa menunjukkan prosentase yang hampir sama yakni sekitar 25% orang tua berpendidikan menengah ke atas selebihnya adalah pendidikan dasar

bahkan tidak tamat sekolah dasar (Dokumentasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Berdasarkan hasil observasi juga ditemukan bahwa orang tua siswa yang aktif dan semangat dalam partisipasi dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SDN Mlokorejo II adalah orang tua siswa yang tingkat pendidikannya menengah ke atas dan kondisi ekonomi yang berkecukupan (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa faktor tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi orang tua dapat menjadi tolok ukur partisipasi orang tua siswa terhadap program sekolah. Faktor pendidikan mempengaruhi kesadaran berpartisipasi dan faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan berpartisipasi.

d. Akuntabilitas Publik

Seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat pada kurun waktu lima tahun terakhir ini, masyarakat sudah mulai dapat diajak bermusyawarah untuk beberapa program sekolah yang membutuhkan dana, sehingga terjadi peningkatan angka partisipasi masyarakat yang cukup signifikan. Seperti hasil wawancara dengan kepala SDN Mlokorejo II berikut ini:

“Sesungguhnya partisipasi masyarakat tidak sulit digerakkan ketika telah terjadi pemahaman yang sama, kepercayaan dan keterbukaan terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Prinsip kami adalah bahwa musyawarah adalah wadah yang paling efektif dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam hal ini orang tua siswa, musyawarah menggambarkan pola kerjasama yang setara antara dua belah pihak, kami pikir bahwa prinsip kemitraan sangat kental dalam

kegiatan musyawarah, sehingga keputusan yang lahir dari hasil musyawarah cenderung menjadi milik bersama dan realisasinya pun pasti dilakukan bersama-sama.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Lalu apa yang menyebabkan masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi? Kepala SDN Mlokorejo II menuturkan:

“Saya kira kata kuncinya adalah *trust* dengan mengedepankan akuntabilitas dan mengikutsertakan mereka dalam kepanitiaan apapun yang ada kaitannya dengan pengelolaan dana/keuangan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengajak mereka musyawarah dalam kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar serta pengawasan terhadap tenaga guru. Tentu saja pihak sekolah harus mengupayakan peningkatan mutu secara terus menerus. Sebagai perwujudan dari besarnya kepedulian mereka itu, dan paling penting adalah pelaporan tentang penggunaan dan tersebut harus terbuka.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

e. Inovasi Program Sekolah

Hampir semua informan baik orang tua, guru maupun kepala sekolah mengungkapkan antusiasme dan dukungan penuh kepada apapun program sekolah, apalagi kegiatan keagamaan. Sebagai umat Islam, bagi mereka mendukung program-program keagamaan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa di SDN Mlokorejo II terdapat beberapa program keagamaan seperti: membaca ayat-ayat al-Quran dan shalat Dhuha berjamaah. Program semacam ini cenderung lebih diminati dan mendapat dukungan penuh dari para orang tua (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Kemudian, Kepala Sekolah menjelaskan tentang inovasi program sekolah tersebut sebagai berikut,

“Membaca ayat-ayat al-Quran tersebut dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelajaran di mulai, yaitu dengan cara siswa kelas VI memimpin kelas yang lain menggunakan pengeras suara. Sedangkan shalat Dhuha berjamaah dilaksanakan pada saat Istirahat pertama, yaitu sekitar jam 09.00 WIB.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di SDN Mlokorejo II antara lain: faktor manajemen sekolah, faktor kepemimpinan kepala sekolah, faktor akuntabilitas publik, faktor tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua, dan faktor inovasi program.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II

Ketika partisipasi itu sudah berwujud sesuatu barulah kemudian manajemen partisipasi yang dikembangkan sekolah dikatakan berhasil, karena maksud dan tujuan pengelolaan sumber daya adalah menghendaki efektifitas dan efisiensi. Dimanakan efektif dan efisien adalah jika partisipasi masyarakat itu sudah terwujud dan berdampak pada pengembangan pendidikan di sekolah.

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat kepada SDN Mlokorejo II yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti mencoba membagi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam dalam dua bentuk, yakni partisipasi dalam bentuk materi dan partisipasi non materi.

a. Partisipasi Materi

1) Uang / Iuran

Berdasarkan temuan penelitian di SDN Mlokorejo II, bahwa terkait dengan kegiatan operasional, pihak sekolah tidak memungut dana dari orang tua siswa, karena telah ada dana BOS dari pemerintah. Dukungan finansial yang bersumber dari orang tua siswa yaitu yang bersifat insidental adalah sumbangan orang tua terhadap satu program kegiatan sekolah di luar kegiatan operasional yang sewaktu-waktu diminta karena ada keperluan dana tambahan, misalnya: pembangunan gedung belajar, laboratorium, mushallah, termasuk di dalamnya dana untuk rekreasi setelah Ujian Nasional. Partisipasi dalam bentuk finansial ini besarnya disesuaikan dengan kemampuan para orang tua siswa yang disepakati melalui musyawarah komite dan berlaku bagi seluruh orang tua siswa (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

2) Material/Bangunan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di SDN Mlokorejo II, terdapat sebagian pihak yang memiliki kelebihan kemampuan atau karena melalui kesepakatan, ada yang memberikan sumbangan dalam bentuk material/bahan-bangunan untuk pengadaan beberapa sarana disertai partisipasi dalam bentuk tenaga yang secara kebetulan ada orang tua siswa yang berprofesi sebagai

tukang batu, tukang kayu, tukang besi bahkan buruh bangunan sekalipun, sehingga terjadi kerja bhakti di sekolah (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

b. Partisipasi Non Materi

1) Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Kerjasama

Program kerjasama sekolah dengan pihak luar baik masyarakat umum maupun lembaga tertentu, merupakan salah wujud partisipasi masyarakat terhadap program sekolah. Salah satu contoh, sebagaimana disampaikan oleh Waka. Humas berikut:

“SDN Mlokorejo II menjalin kerjasama dengan dengan seluruh pengurus masjid yang ada di sekitar sebagai program rutin tahunan untuk mengirim siswanya mengisi ceramah Ramadhan, dengan tujuan antara lain: syi’ar Islam, menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat, menjadikan masjid sebagai laboratorium keterampilan keagamaan bagi siswa.” (Wawancara, Umar Sholeh, 09/02/2015).

2) Partisipasi dalam Bentuk Ide dan Pemikiran dan Tenaga

Perhatian dan pengawasan orang tua terhadap program pendidikan sesungguhnya adalah bagian terpenting dari tugas orang tua siswa melalui lembaga komite. Umumnya yang terjadi justru bentuk partisipasi semacam ini sangat minim. Orang tua cenderung menerima semua ide-ide pemikiran yang datang dari pihak penyelenggara sekolah.

Lebih jauh peneliti menelusuri hal ini sehingga terungkap dalam satu wawancara dengan kepala SDN Mlokorejo II.

“Kami sebenarnya selalu mengharapkan usulan atau ide-ide dari orang tua siswa tetapi hal itu sulit sekali, kalau pun ada itu sangat jarang sekali terjadi, mereka sebatas menyetujui dan menerima saja apa yang ditawarkan oleh sekolah, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu orang tua siswa yang mengatakan: “Biar sekolah yang mengatur semua kita terima saja, kami mana mengerti urusan sekolah, yang penting anak kita bisa lulus.” (Wawancara, Aminah, 13/02/2015).

Hal senada juga disampaikan oleh hampir semua warga sekolah yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

3) Kodusifitas Lingkungan Sekolah

Satu hal yang sering dilupakan adalah suasana lingkungan sekitar sekolah yang kondusif. Kondisi yang nyaman, aman dan tenang, tetangga sekolah yang punya kepedulian (*care*) dengan kehadiran sekolah, pemerintah atau aparat yang mendukung, ikut menjaga dan mengamankan sekolah dari gangguan dan ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya mutlak menjadi kebutuhan sekolah.

Hal ini diyakini oleh kepala SDN Mlokorejo II sebagai sebuah solusi positif dalam menjaga keamanan sekolah dan memadukannya dengan keterlibatan masyarakat sekitar, dalam satu wawancara beliau mengatakan:

“Ada tetangga di sekitar sekolah meminta pekerjaan mau jadi apa saja katanya, secara kebetulan saya butuh tenaga kebersihan khusus ruang kelas, dia bersedia dengan

pekerjaan itu sampai sekarang *alhamdulillah* semua berjalan dengan lancar.” (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Kepala SDN Mlokorejo II juga menambah keterangan di atas bahwa, pihak sekolah mengangkat tenaga penjaga sekolah dari warga masyarakat setempat, dengan alasan merekalah yang paling mengerti kondisi dan situasi lingkungan sekitar sekolah, sehingga diharapkan ada rasa memiliki terhadap sekolah dan bertanggungjawab secara moral terhadap keamanan sekolah (Wawancara, Drs. Agus Purwiyanto, 03/02/2015).

Seorang penjaga SDN Mlokorejo II mengatakan bahwa ia diminta oleh pihak sekolah untuk menjadi tenaga keamanan dan kebersihan sekolah sebab ia tahu persis kondisi di lingkungan sekitar sekolah, mengenal orang-orang di sekitar sekolah sehingga memudahkan ia untuk mengendalikannya (Wawancara, Agus Salim, 16/02/2015).

Hasil observasi peneliti juga menemukan bahwa kondisi kebersihan dan keamanan di lingkungan SDN Mlokorejo II telah kondusif. Hal itu disebabkan karena komitmen semua warga sekolah dan masyarakat yang merasa memiliki lembaga tersebut (Observasi, SDN Mlokorejo II, 02/02/2015).

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di SDN Mlokorejo II antara lain: (1) Partisipasi materi, seperti: sumbangan uang dan bahan bangunan. (2) Partisipasi non

matrial, seperti: sumbangan kerjasama, sumbangan ide dan saran, dan dan sumbangan moril, pengawasan, keamanan, dan komitmen bersama.

B. Pembahasan Penelitian

Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat, dalam pelaksanaannya mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Dalam peran sosialnya, sekolah merupakan sistem terbuka di mana organisasi mengambil manfaat dari lingkungan, mengalihkan ke produksi luar. Sebagai contoh sekolah mengambil tenaga kerja, siswa dan uang dari lingkungan dan adanya subyek kepada proses transformasi pendidikan untuk menghasilkan dan mendidik siswa dari masing-masing tingkat (Rivai, Veithzal, 2009: 198).

Kenyataan ditemui di lapangan, bahwa SDN Mlokorejo II menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang cukup baik dari masyarakat. Kondisi ini berlangsung sejak berdiri hingga sekarang. Segala bentuk dukungan dari masyarakat baik masyarakat luas, masyarakat terorganisir dan terutama orang tua siswa, walaupun terdapat indikasi penurunan *motivasi* berpartisipasi dalam diri masyarakat itu sendiri pada kurun-kurun waktu terakhir. Dengan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat sebagai komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan, maka prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan.

1. Penerapan Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II

Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat selama ini SDN Mlokorejo II pada dasarnya telah berlangsung sejak awal sekolah ini dirintis. Kenyataannya berapa banyak program sekolah yang dapat direalisasikan berkat partisipasi orang tua siswa maupun masyarakat umum, mulai dari program pisik, dukungan moril, komitmen bersama, ataupun program-program kerjasama dengan masyarakat umum, semuanya menunjukkan tanda-tanda yang signifikan.

Mengapa kemudian terjadi kondisi penurunan motivasi berpartisipasi masyarakat pada kurun waktu terakhir? Berdasarkan data penelitian ditemukan ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi minat berpartisipasi masyarakat terhadap program sekolah yang akan dibahas pada sub judul berikutnya. Salah satu di antara faktor yang dimaksud adalah manajemen sekolah.

Dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain: (1) proses pendidikan yang berjalan di sekolah tersebut, (2) kelengkapan sarana dan prasarana, (3) profesionalitas tenaga kependidikan dan sumber daya manusia, (4) prestasi akademik peserta didik, dan (5) kualitas manajemen sekolah (Achmadi, 1995: 13). Namun Sergiovani dalam Veitzal Rifai (2009: 198) menekankan diantara indikator-indikator itu, manajemen sekolah menempati posisi paling strategis.

Jika demikian halnya, sebagaimana paparan data di atas, bahwa sekolah ini diindikasikan belum menerapkan prinsip manajemen secara maksimal dalam program-program kemasyarakatannya (partisipasi masyarakat), berikut ini akan dibahas berdasarkan teori yang ada, sehingga akan ditemukan bentuk manajemen apa yang sebenarnya diterapkan oleh sekolah tersebut.

Banyak teori mengatakan bahwa merencanakan pekerjaan dengan baik dan matang berarti 60 persen program tersebut telah selesai dilaksanakan, demikian strategisnya arti sebuah perencanaan.

Menurut hemat penulis bahwa pada sekolah yang bersangkutan menunjukkan tidak maksimalnya penerapan prinsip-prinsip manajemen, misalnya dalam perencanaan, peneliti melihat bahwa komponen-komponen perencanaan yang seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan, hal itu tidak dilakukan tetapi hanya sebatas membuat program kerja atau uraian tugas.

Padahal Didin Hafifuddin (2005: 77) menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan sebagai berikut:

(1) hasil yang ingin dicapai, (2) orang yang akan melakukan, (3) waktu dan skala prioritas, (4) dana (capital).

Bahkan Hendyat Soetopo (2001: 6), mengatakan bahwa suatu usaha tanpa rencana sukar diharapkan daya guna dan hasil gunanya. Karenanya ia memunculkan berbagai pertentangan yang mungkin timbul pada saat proses memikirkan perencanaan, antara lain: apa yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana cara atau metode yang efektif dan efisien, mengapa demikian, bilamana kegiatan tersebut dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakannya, sumber daya apa yang diperlukan, kemungkinan-kemungkinan apa yang kiranya dapat mempengaruhi pelaksanaannya, bagaimana monitor dan menilai hasil pelaksanaannya.

Mencermati rincian pertentangan yang kemungkinan timbul pada saat memikirkan perencanaan yang dikemukakan oleh Hendiyat Soetopo di atas, sangatlah cermat dan tuntas sehingga semakin menguatkan saja bahwa perencanaan yang baik dan maksimal memang telah menyelesaikan 60 persen pekerjaan kita.

Dalam hal pengorganisasian, secara struktur organisasi sekolah telah menunjukkan posisi yang tepat bagi lembaga-lembaga penyelenggara kegiatan ke-Humas-an dalam hal ini Komite Sekolah dan Bidang Humas sekolah. Posisi atau jabatan menunjukkan besar kecilnya wewenang seseorang. Namun dalam praktek terkadang ada jabatan yang diberikan kepada seseorang tidak disertai dengan wewenang yang seharusnya ia miliki, sehingga terkesan ada pendelegasian wewenang 'setengah hati' yang diistilahkan oleh Didin Hafifudin (2003: 78), yang seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Karena pendelegasian wewenang memungkinkan seorang bawahan untuk melaksanakan tugas dengan baik disamping dapat berkreasi dan berinovasi mengembangkan dirinya berdasarkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tetapi mana mungkin pendelegasian

itu dapat diberikan sepenuhnya, bila SDM yang ditempatkan pada *job* tersebut tidak pula menguasai tugasnya berkenaan dengan beberapa hal yang belum terpenuhi untuk memegang *job* yang dimaksud.

Demikian pula halnya dengan Komite Sekolah yang belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selama ini Komite Sekolah masih dianggap sebatas mewakili orang tua siswa dalam memutuskan besaran dana yang harus dikeluarkan ketika sekolah meminta sumbangan. Padahal bila dicermati lebih jauh bahwa sesungguhnya secara kontekstual Komite Sekolah berfungsi sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002).

Berbicara tentang implementasi program partisipasi masyarakat di SDN Mlokorejo II, sebagaimana dipaparkan sebelumnya dalam analisa penulis, hal itu terjadi secara *konvensional* dan *rutinitas* bahkan sangat *insidentil*. Bila dikaitkan dengan fungsi manajemen Humas sebelumnya,

maka implementasi program-program tersebut menjadi tidak terarah dan sulit memelihara kesinambungannya, tidak dapat diukur capaian-capaiannya dan tidak dapat dijadikan rujukan untuk kegiatan berikutnya, karena kontrol dan evaluasi yang seharusnya ada, tetapi tidak dilakukan, menjadikan seluruh kegiatan partisipasi masyarakat yang sudah ada tersebut belum dapat dikatakan berhasil secara manajerial.

Namun dalam pelaksanaan partisipasi itu sendiri sudah terwujud melalui beberapa bentuk yang semuanya diputuskan melalui musyawarah. Bila dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Joseph L. Massie (1983: 23), dilihat dari sistem pelaksanaannya manajemen dikategorikan pada: (1) manajemen ilmiah (*scientific management*) yaitu manajemen yang dicirikan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah, (2) manajemen tertutup mempunyai ciri di mana pemimpin membuat keputusan tanpa mengadakan konsultasi atau meminta pendapat dari bawahannya, (3) manajemen terbuka (*open management*) yaitu suatu sistem pelaksanaan manajemen, dimana seorang manajer atau pimpinan sebelum mengambil keputusan member kesempatan terlebih dahulu kepada bawahannya untuk memberikan saran-saran atau pendapat walaupun keputusan terakhir berada pada pimpinan, maka sistem pelaksanaan manajemen yang ada pada obyek penelitian adalah sistem manajemen terbuka (*open management*).

2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II

Sesungguhnya kondisi umum yang terjadi di tengah masyarakat semakin menunjukkan keleluasaan berpartisipasi, terutama di daerah pedesaan. Peran serta yang dimaksud adalah dukungan, dorongan, dan upaya nyata masyarakat sekitar dalam memperbaiki mutu sekolah, baik dalam wujud fisik, *finansial*, bantuan-bantuan jasa pelayanan maupun yang bersifat *sosial psikologis*.

Menurut Slamet (1992: 112), partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yakni (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan, dalam hal ini masyarakat. Sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari masyarakat sungguh pun telah diberi kesempatan oleh pemerintah, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga jika ada kemauan dan kemampuan tapi tidak ada ruang atau kesepakatan yang diberikan oleh pemerintahan maka tidak mungkin juga partisipasi. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pendidikan di SDN Mlokorejo II, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan

kemampuan warga masyarakat dan keluarga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sebaliknya pihak pemerintah perlu memberikan ruang dalam lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif apa, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka latar belakang pendidikan orang tua siswa yang masih rendah seperti yang menjadi temuan peneliti menjadi kendala partisipasi masyarakat terhadap SDN Mlokorejo II sebagaimana data yang dipaparkan sebelumnya. Bila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Maisyaroh (2000: 21) tentang fleksibilitas, relevansi, partisipasi, konprehensif dan melembaga, ini akan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi.

Berbicara dalam hal manajemen khusus dalam bidang ke-Humas-an manajemen belum tertata dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa bidang yang menangani ke-Humas-an pada sekolah yang bersangkutan belum paham dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Selama ini yang terjadi bahwa Humas cenderung menjadi pelengkap struktur organisasi serta SDM yang ditempatkan di situ adalah orang yang kualifikasinya berada di bawah bidang yang lain. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah yang menjadi obyek penelitian ini, bahwa bidang Humas pada sekolah tersebut belum maksimal baik dalam hal perencanaan, pengorganisasiannya, pelaksanaannya sampai kepada evaluasi, cenderung tidak menjadi konsentrasi sekolah.

Padahal Humas berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan sekolah, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sekolah dengan demikian akan tumbuh membangun saling pengertian antara kedua belah pihak untuk kemudian dapat melahirkan proses pembelajaran yang baik dan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Jika peran Humas sekolah benar-benar maksimal tentu faktor-faktor penghambat partisipasi dapat ditemukan solusi terbaik dan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Karena kalau hal itu tidak segera di tangani maka pada saatnya nanti sekolah akan mengalami.

Sebagaimana yang dikatakan Hendyat Sotopo (2001: 11) bahwa lembaga yang terpisah dari masyarakat akan ditinggalkan oleh masyarakatnya karena itu masyarakat perlu dilibatkan dalam penentuan dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya tujuan pelibatan masyarakat dalam pendidikan adalah agar lembaga tersebut mendapat informasi masukan dari masyarakat berkenaan dengan keutuhan dan harapannya. Suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat tidak akan dapat menyesuaikan kebutuhan penggunaannya disebabkan ketidaktahuannya terhadap kebutuhan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang harus disajikan oleh lembaga.

Irvin Smith Kogan dalam Bambang (1992: 14) memberikan syarat-syarat Humas yang efektif antara lain:

- a. Pejabat Humas mempunyai informasi yang lengkap tentang organisasi

- b. Pucuk pimpinan operasional harus bertanggungjawab tentang ke-Humas-an
- c. Manajemen harus mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat Humas
- d. Harus ada sistem *accountability* terhadap performa pejabat Humas
- e. Ke-Humas-an harus lebih banyak memikirkan obyektifitas jangka panjang daripada obyektifitas jangka pendek.

Komite yang seolah-olah hampir tidak memiliki pekerjaan, yang terjadi selama ini, komite hanya menerima undangan sekolah, bermusyarah dalam rapat, kemudian keputusan rapat dilaksanakan, tanpa adanya kritik, saran ataupun sumbangan ide, apalagi mengevaluasi atau mengawasi kinerja sekolah. Tidak adanya saling ketergantungan dua komponen ini membuat sekolah dan masyarakat terkesan ‘bercerai’, padahal menurut Malik Fajar (2001: 46), tujuan utama reformasi dan pengembangan SDM berbasis masyarakat adalah: (1) membantu beban tugas pemerintah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan; (2) menstimulasi perubahan sikap dan persepsi terhadap rasa kepemilikan sekolah tanggungjawab kemitraan dan toleransi serta kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya; (3) mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah melalui kebijakan desentralisasi; (4) mendukung peranan masyarakat guna mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi

peningkatan mutu dan relevansi pembukaan kesempatan yang lebih, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar dan tinggi.

Perlu digarisbawahi bahwa persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan milik pemerintah adalah bahwa masyarakat cenderung tidak memiliki *since belonging* terhadap sekolah yang bersangkutan. Masyarakat menganggap sekolah adalah milik pemerintah, disubsidi oleh pemerintah, diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah sendiri yang akan mengevaluasi kinerjanya. Masyarakat menganggap dirinya obyek/sasaran program pendidikan dan pencerdasan bangsa, mereka tinggal mengikuti seluruh program sekolah tanpa partisipasi aktif di dalamnya dengan kata lain masyarakat hanya berpartisipasi secara pasif.

Kondisi semacam ini terjadi bisa disebabkan beberapa faktor yang kemudian menjadi kendala sekolah dalam menjangkau partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan diantaranya faktor manajemen ke-Humas-an yang tidak maksimal, faktor latar belakang partisipan yang dapat dikelompokkan dalam empat hal yakni persepsi yang salah terhadap keberadaan sekolah, interpretasi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah, tingkat ekonomi masyarakat yang masih lemah, dan derajat pendidikan orang tua yang masih rendah.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam SDN Mlokorejo II

Upaya menumbuhkan motivasi berpartisipasi masyarakat melalui manajemen sekolah baru dikatakan efektif jika partisipasi itu telah terwujud, baik dalam bentuk materi, ide, pemikiran dan gagasan, atau dorongan semangat dan dukungan moril lainnya bahkan juga tenaga.

Apa yang terjadi selama ini di SDN Mlokorejo II adalah gairah berpartisipasi masyarakat semakin menurun dari waktu ke waktu. Dulu ketika sekolah-sekolah ini baru dirintis pertama kali yang paling berperan dalam hal ini adalah masyarakat. Segala bentuk dukungan telah dilakukan, baik dukungan moril maupun materiil.

Dalam konteks pembangunan umat yang dihimpit kebodohan dan keterbelakangan saat ini, ide, pemikiran dan gagasan mutlak diperlukan untuk menemukan strategi yang tepat dalam mengatasinya. Dan harta atau materi pun mutlak diperlukan untuk memerangi kemiskinan itu. Demikian pula dalam konteks pengembangan pendidikan Islam saat ini, mungkin jiwa tidak menjadi kebutuhan prioritas, karena stabilitas dan kondusifitas lingkungan belajar cukup baik, tetapi sebagai penggantinya adalah ide, pemikiran dan gagasan untuk memajukan dan meng-akselerasi-kembangkan pendidikan itu sendiri, adapun harta atau materi jelas diperlukan untuk mengejar ketertinggalan sarana dan fasilitas pendidikan yang semakin canggih dan modern.

Partisipasi materil dari masyarakat selama ini telah ikut memberi andil bagi keberlangsungan pendidikan pada SDN Mlokorejo II. Selain itu beberapa sarana pendidikan dan ibadah telah disumbangkan oleh masyarakat umum dan orang tua siswa. Namun bila dicermati lebih jauh dan berorientasi kepada pengembangan pendidikan zaman sekarang dan mendatang, apa yang dilakukan oleh masyarakat masih jauh berada di bawah standar kemajuan sebuah sekolah, apalagi bila dibandingkan dengan program sekolah modern bertaraf internasional.

Dalam hemat penulis kebijakan pendidikan gratis memang menguntungkan masyarakat di satu sisi, tetapi juga dapat merugikan lembaga pendidikan disisi lain bahkan masyarakat itu sendiri, bila tidak disertai peningkatan mutu yang signifikan.

Istilah pendidikan gratis sungguh sangat keliru. Karena bila dicermati lebih dalam bahwa dana yang disubsidikan oleh pemerintah daerah kepada sekolah pengganti SPP sangatlah kecil, tidak pula membuat biaya pendidikan menjadi *fullfree* (bebas penuh), karena masih lebih banyak yang harus dibayar ketimbang yang gratis.

Sungguh sebuah kemunduran, dan lebih ironis lagi adalah bahwa kebijakan pendidikan gratis ini telah mempengaruhi motivasi masyarakat dan membatasi kreatifitas sekolah untuk menjaring partisipasi atau peran serta masyarakat seluas-luasnya dalam pendidikan, sehingga amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

Alangkah bijaksananya bila kebijakan itu tidak menggunakan nama atau istilah gratis karena seharusnya *education is not free*, sarat pengorbanan uang, waktu, tenaga dan pikiran. Istilah ini dapat mempengaruhi sikap dan menjadikan masyarakat dimanjakan oleh kebijakan, menciptakan mental peminta-minta yang selalu menanti uluran tangan pemerintah dan mengharapkan kebaikan hati seorang penguasa.

Adapun partisipasi non materi juga merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan partisipasi materiil. Dalam konsep pendidikan demokratis, bahwa dukungan masyarakat berbentuk non materi menjadi penting untuk diorganisir sebagai aset sekolah.

Menurut Allen dalam Dede Rosyada (2007: 7), salah satu keunggulan pendidikan demokratis adalah keterlibatan masyarakat dalam sekolah merupakan *refleksi* dari keinginan masyarakat akan berpartisipasi dalam pendidikan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah dan akan *responsif* dengan berbagai persoalan sekolah dan kinerja guru, sehingga guru dapat bekerja dengan tenang karena merasa berada bersama masyarakat, keputusan sekolah dan pimpinan juga akan menjadi keputusan yang bulat karena disepakati bersama dengan masyarakat dan sekolah akan selalu terkontrol dengan *mekanisme* yang diatur dan dikontrol oleh masyarakat.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Dalam penjabarannya

kemudian masyarakat berhak mengetahui secara lengkap informasi tentang sekolah yang mana informasi ini harus diupayakan oleh sekolah agar sampai ke telinga masyarakat.

Dalam hal ini Humas melalui banyak cara seperti konsep-konsep yang dikemukakan oleh teori ke-Humas-an dalam pendidikan dengan begitu masyarakat dapat mengoreksi dan mengevaluasi serta memberikan masukan dan saran bagi kemajuan sekolah. Kalau kemudian sekolah tidak memiliki program yang baik untuk itu maka jangan disalahkan bila kemudian masyarakat cenderung menjadi pasif. Ini adalah salah satu faktor mengapa masyarakat lebih memilih menerima saja keputusan yang ada karena perkembangan dan tahapan perkembangan sekolah tidak ada informasinya yang lengkap, disamping faktor utamanya adalah bahwa masyarakat masih kekurangan ide dan gagasan yang dapat disumbangkan kepada sekolah.

Partisipasi non materi lainnya yang dapat diharapkan berupa pengawasan dan kerjasama yang baik serta pengertian timbal balik terhadap program dan kebijakan sekolah. Seperti apa yang disaksikan peneliti dalam observasinya berupa *apresiasi positif* terhadap program-program sekolah, dengan cara ikut membantu dan mengawasi anak-anak dalam proses kegiatan sekolah yang sedang berlangsung, sehingga terbentuk kesamaan visi antara sekolah dan orang tua siswa.

Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik juga dapat dilihat pada sekolah ini. Bahkan bentuk partisipasi inilah yang dapat dikatakan stabil dari waktu ke waktu baik sejak berdirinya sekolah ini hingga sekarang.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa sekolah ini tetap berprinsip bahwa budaya gotong royong adalah warisan nenek moyang jaman dahulu yang memiliki nilai luhur di dalamnya. Semangat kebersamaan yang tinggi, nilai kesetaraan, kepedulian dan kerja keras sangat kental terasa, namun menurut pengakuan kepala sekolah hal ini juga dilakukan oleh orang tua siswa dengan kesadaran penuh bahwa kalau tidak bisa membantu dengan materi paling tidak tenaga juga berguna untuk disumbangkan.

Selain itu ada hal sederhana yang dapat digolongkan dalam partisipasi non materi yang dapat diperoleh dari masyarakat setempat di mana hal ini cukup berarti bagi kelangsungan dan kelancaran pendidikan di sekolah, yakni penciptaan suasana *kondusif* oleh masyarakat sekitar dengan berupaya melakukan penjagaan dan pengawasan sekitar sekolah. Sehingga dapat penulis garis bawahi bahwa peran serta masyarakat dalam bentuk non materi tidak mungkin diabaikan mengingat hal tersebut cukup membantu kelangsungan pendidikan di sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap sekolah yang berbentuk finansial memang mutlak dibutuhkan oleh sekolah, walaupun saat ini dana hanya dapat diharapkan dari sumbangan yang bersifat *insidental* ketika ada kebutuhan sekolah yang tidak bisa *terkafer* dari subsidi pemerintah dan itu

hanya bisa diharapkan dari beberapa orang tua siswa yang memiliki kelebihan dalam hal ekonomi sedangkan umumnya tentu berpartisipasi dalam jumlah standar sekali lagi tetap berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah.

Walaupun sesungguhnya partisipasi berupa ide pemikiran dan gagasan sifatnya tak ternilai harganya, namun ini tidak dapat diharapkan lebih banyak dari masyarakat karena masyarakat cenderung menerima apa saja yang menjadi kebijakan sekolah terutama kebijakan yang bersifat kurikuler, karenanya sekolah dalam mengeluarkan kebijakannya cenderung menggunakan pendekatan *top down* tentu saja tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa manajemen pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam di SDN Mlokorejo II, dapat disimpulkan:

1. Penerapan manajemen partisipasi dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan oleh SDN Mlokorejo II adalah manajemen partisipatif (*participation management*), dengan sistem pelaksanaan terbuka (*open management*), melalui musyawarah sebagai metode komunikasi utamanya. Dalam pengembangan program-program fisik, menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*), sedangkan dalam program pengembangan non fisik cenderung menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) dengan mengedepankan prinsip-prinsip *relevansi*.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II adalah: (a) manajemen sekolah, (b) kepemimpinan kepala sekolah, (c) faktor latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua murid, (d) faktor akuntabilitas publik, dan (e) faktor inovasi program sekolah.
3. Bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II dapat dibagi dua yakni: (1) Partisipasi materi, seperti: sumbangan uang dan

bahan bangunan. (2) Partisipasi non material, seperti: sumbangan kerjasama, sumbangan ide dan saran, dan dan sumbangan moril, pengawasan, keamanan, dan komitmen bersama.

B. Saran-saran

1. Untuk SDN Mlokorejo II

Penelitian ini merupakan gambaran secara *deskriptif* tentang manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh SDN Mlokorejo II, semoga dapat dijadikan sumber informasi faktual dalam mengembangkan manajemen lembaga khususnya dalam mengembangkan partisipasi masyarakat agar terus dilakukan *kreasi* dan *inovasi* seiring perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan, dengan beberapa alternatif pemecahan, yakni:

- a. Hendaknya manajemen partisipasi masyarakat dapat terus disempurnakan dengan menerapkan prinsip manajemen Humas yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.
- b. Hendaknya lebih memaksimalkan *interpretasi* terhadap profesi ke-Humas-an sebagai bidang yang menjembatani sekolah dengan masyarakat.
- c. Hendaknya lebih memaksimalkan fungsi dan peran komite sekolah atau majlis sekolah dalam seluruh kebijakan sekolah baik *kurikuler* maupun *non kurikuler*.

- d. Sekolah dapat memadukan antara program Humas dengan kegiatan keagamaan mengingat masyarakat setempat mayoritas muslim. Seperti kegiatan menghadirkan tokoh, ahli, atau profesi-profesi tertentu untuk menjadi pembicara di sekolah dalam rangka memperluas wawasan siswa dengan cara menghadirkannya dalam sebuah forum.
- e. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penyusunan rencana dan pengembangan strategi sekolah berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan manajemen Humas.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Dalam rangka bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun HDI (*Human Development Index*), hendaknya istilah pendidikan gratis harus diperjelas, pihak pemerintah perlu memberikan ruang dalam lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, *seintensif* apa, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan. Sekiranya pemerintah daerah bermaksud meringankan beban masyarakat namun tetap mengutamakan mutu pendidikan, maka subsidi seharusnya tidak dalam bentuk penggratisan uang SPP tetapi penyediaan fasilitas dan sarana belajar yang memadai dan bermutu (UU No. 20 tahun 2003 pasal 10 dan 11), seperti pengadaan buku dan *referensi* pendidikan yang bermutu, fasilitas pembelajaran yang modern, serta sarana-sarana penunjang pengembangan pendidikan yang memadai.

3. Untuk Pengembangan Keilmuan

- a. Penelitian ini dilakukan di satu tempat yaitu SDN Mlokorejo II. Untuk penelitian berikutnya hendaknya dapat dilakukan pada situs yang lebih luas dan dalam kasus yang berbeda (*multikasus*).
- b. Hendaknya penelitian tentang partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara lebih mendalam dan *intensif* mengingat peran serta masyarakat dalam pendidikan mengalami penurunan dari waktu ke waktu berdasarkan faktor yang ikut mempengaruhinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Salih. 1999. *Educational Theory: Quranic Outlook*, (terj). Jakarta: Rineka Cipta
- Abdullah, Djalaluddin. 1997. *Kapita selekta Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Al Abrasyi, M. Athiyah. 1993. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terjemahan H. Bustami dari judul asli *Tarbiyyah Islamiyah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Al Attas, Muhammad al Naquib. 1988. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan
- Al-Ghazali, Muhammad. 2006. *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Arifin, H.M. 2003. *Kapita Selektta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Syamsul. 1996. *Spiritualitas Islam Dan Peradaban Masa Depan*. Yogyakarta: Si Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ashraf, Ali. 1993. *Horison Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bawani, Imam. 1987. *Segi-segi Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Conyears, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fatah, Nanang. 2005. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Langgulong, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- Langgulong, Hasan. 1988. *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Latif, Abdul. 2009. *Pendidikan Bebas Nilai Kemasyarakatan*, Bandung: Rafika Adhitama
- Manullang, M. 1989. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Margono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marimba, Ahmad D. 1980. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung. PT. Al Ma'arif.
- Moeliono, A.M. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Risdakarya

- Muhaimin. 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Cendikya.
- Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mujdjahid. 2003. *Manajemen Sekolah Mandiri*. Jakarta: Puslitbang
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Konsep Strategi Dan Implementasi*. Bandung: PT. Rosdakarta
- Nasution, Harun. 1977. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*. Jakarta: UI Press.
- Nata, Abuddin. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurdin, Ali. 2006. *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al Qur'an*, Jakarta: Erlangga.
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ramayulis. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sagala, S. 2011. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Shihab Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Siagian, Sondang. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Slamet Santoso, 1992. *Supervisi Pengembangan masyarakat*, Bandung: PT. Enerco
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno. 1995. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Jakarta: FE.U
- Terry, GR. 1964. *The Principles of Management. Third Edition*. Homewood Illinois: Richard Irwin
- Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara

Gambaran Obyek Penelitian

A. Profil Sekolah

- a. Nama Sekolah : SDN MLOKOREJO 02
 - b. No Statistik : 10105241 9040
 - c. Pemerintahan Kab/Kota : Jember
 - d. Kecamatan : Puger
 - e. Desa/Kelurahan : Mlokorejo
 - f. Jalan dan Nomer : Jl.Raya Kencong No.44
 - g. Kode Pos : 68614
 - h. Telepon : 0336 721532
 - i. Daerah : Pedesaan
 - j. Status Sekolah : Negeri
 - k. Akreditasi : B
 - l. Tahun Berdiri : 1962
 - m. Kegiatan Belajar : Pagi
 - n. Bangunan Sekolah : Milik Sendiri
 - o. Lokasi Sekolah : Desa Mlokorejo
- 1) Jarak ke pusat Kec : 7 kilometer
 - 2) Jarak ke pusat Kota : 30 kilometer
 - 3) Terletak pada lintasan : Kecamatan
- p. Organisasi Penyelenggara : Pemerintahan

(Sumber: Dokumentasi SDN Mlokorejo 02, 02/02/2015).

B. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

“Membentuk Siswa yang Unggul dalam Prestasi, Berpedoman pada Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

b. Misi

- 1) Standar dalam Pengembangan Kurikulum
- 2) Standar dalam Proses Pembelajaran
- 3) Standar dalam Kelulusan
- 4) Standar dalam Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar dalam Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 6) Standar dalam Menejemen Sekolah
- 7) Standar dalam Penggalangan Biaya Pendidikan
- 8) Standar dalam Penilaian Prestasi Akademik dan Non Akademik

(Sumber: Dokumentasi SDN Mlokorejo 02, 02/02/2015).

IAIN JEMBER

C. Keadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama	NIP/NUTPK	Pangkat/Gol.	Jabatan	Alamat Rumah No. Telp.
1	Drs. AGUS PURWIYANTO	19640817 198504 1 003 / 0149742632000033	Pembina, IV/a	Kepala Sekolah	Kasiyan Timur/ 085258762548
2	UMAR SHOLEH	19570909 197702 1 001 / 2241735637200043	Pembina TK I, IV/b	Guru	Mlokorejo/ 082142094095
3	SITI INDRIYAH, S.Pd.I.	19540225 197912 2 002 / 5557732633300012	Pembina, IV/a	Guru PAI	Bagorejo – Gumukmas/ 0336-7724354
4	INDA SULISTIYANI,S.Pd.	19680921 199112 2 002 / 6253746647300013	Pembina, IV/a	Guru	Bagorejo – Gumukmas/ 081249084263
5	ENI YULI DWININGSIH,S.Pd.	19650729 199202 2 001 / 3061743644300043	Penata, III/c	Guru	Mlokorejo/ 085236590042
6	SUPRAYITNO	19660120 200811 1 006 / 6452744646200022	Pengt. Md. Tk I, II/b	Guru Olah Raga	Mlokorejo/ 085854707283
7	SUMARLIK	19710608 200811 2 011 / 4940749651300082	Pengt. Md. II/a	Guru	Mlokorejo/ 0336-7700070
8	LULUK RATNA PALUPI	0257750653300033		Guru Sukwan	Bagorejo-Gumukmas/ 081249092777

9	AJENG WAHYUNING P.	6843763664300052		Guru Sukwan	Mlokorejo / 085236936411
10	TITIK RIKA PRIHATI, A.MPd.	7546754656300032		Guru Sukwan	Gumukmas / 082139834019
11	NURUL HANDAYANI	8644758659300072		Guru Sukwan	Mlokorejo / 082140737830
12	TRI HANDAYANI	9438749653300003		Guru Sukwan	Bagorejo-G.Mas / 0336- 7716104
13	BUDI SETYONO	3555758659200032		Guru Sukwan	Mlokorejo / 0381515661226
14	TRAVESTI RADHITA,	2743762663300072		Guru Sukwan	Bagorejo / 085853915333
15	AGUS SALIM	2149749653200013		Penjaga Sukwan	Mlokorejo

(Sumber: Dokumentasi SDN Mlokorejo 02, 02/02/2015).

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI FOTO



Pertemuan wali murid untuk persiapan kegiatan bulan romadhon (PONDOK ROMADHON),



Pertemuan wali murid untuk persiapan menghadapi UN .orang tua diharapkan ikut mendukung belajar anak di rumah



**Pertemuan wali murid unyuk penggalangan dana pembangunan musolla
Ddan tempat berwudlu**

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember	1. Manajemen partisipasi masyarakat	1. Manajemen	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Kontrol masyarakat	1. Informan: a. Kepala Sekolah b. Guru c. Karyawan d. Siswa	1. Pendekatan Penelitian: <i>Kualitatif</i> 2. Jenis penelitian: <i>Kualitatif Deskriptif</i>	1. Fokus Masalah Bagaimana manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember? 2. Sub Fokus Masalah a. Bagaimana penerapan manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember? b. Faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember? c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
	2. Program Pendidikan Agama Islam	2. Bentuk Partisipasi Masyarakat	a. Partisipasi materi b. Partisipasi non-materi	2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	3. Lokasi Penelitian: SDN Mlokorejo II Kecamatan Puger Kabupaten Jember 4. Metode Pengumpulan Data: - <i>Observasi</i> - <i>Interview</i> - <i>Dokumentasi</i>	
		1. Pendidikan Agama Islam	a. Pendidik dan tenaga kependidikan b. Kesiswaan c. Kurikulum d. Keuangan e. Sarana dan prasarana Pendidikan Agama Islam		5. Metode Analisa Data: <i>Analisa Data Deskriptif</i> 6. Validitas Data: <i>Triangulasi Sumber</i>	